BAB III

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program

Menurut beberapa pendapat ahli, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan pemerintah dengan mempertimbangkan fenomena sosial masyarakat yang terjadi terkait dengan keputusan pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam mencapai tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini merupakan salah satu kebijakan publik yang diimplementasikan ke dalam bentuk program dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi dalam sosial masyarakat. Apabila mengacu pada teori Riant Nugroho, Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini merupakan jenis kebijakan publik sesuai dengan bentuknya dimana peraturan tidak tertulis tetapi disepakati disebut sebagai konvensi atau permufakatan bersama dan dibuat oleh eksekutif.

Penelitian ini mencermati tentang implementasi program "Gerakan Bela-Beli Kulon Progo pada tahun 2015. Gerakan Bela-Beli Kulon Progo sendiri sebenarnya merupakan sebuah slogan seperti ideologisasi yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini merupakan strategi untuk penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif dan memiliki beberapa program dan kegiatan untuk pelaksanaannya. Dalam pembahasan ini peneliti menulis berdasarkan indikator program-program yang

dicanangkan dari Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang merupakan salah satu strategi penguatan ekonomi lokal, Adapun pembahasan implementasi menurut indikator programnya adalah sebagai berikut :

1. **Produksi dan Pemasaran Batik Khas Kulon Progo "Batik Gebleg Renteng"**

Batik Gebleg Renteng merupakan salah satu program unggulan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Dalam hal penguatan ekonomi lokal dan semboyan *"Madhep Mantep Nganggo Barange Dhewe"* Bupati Kulon Progo mempunyai ide untuk memperkaya nuansa batik dan menunjukkan motif batik jati diri batik milik Kulon Progo.

> "Jadi Pak Bupati itu punya inisiatif untuk membuat motif batik khas Kulon Progo, hal ini disampaikan oleh Bupati Kulon Progo pada audiensi FORMI (Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) pada tanggal 08 Desember 2011. Tindak lanjut dari ide tersebut adalah dilaksanakannya lomba design batik motif batik khas Kulon Progo tingkat nasional yang diikuti oleh 304 peserta. Dalam perlombaan tersebut terpilih pemenang lomba design batik yaitu batik motif Gebleg Renteng karya Ales Candra Wibawa, warga asli dari Kulon Progo."(Wawancara dengan Bp. Totok Sundoro, ST. Selaku KaSie Ekspor Impor Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 pada pukul 10.00 WIB)

Tujuan dari motif Batik Gebleg Renteng ini yaitu untuk menciptakan corak ragam baru bermotifkan kekhasan Kabupaten Kulon Progo sebagai jati diri batik Kulon Progo, meningkatkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian budaya

batik, meningkatkan promosi batik, serta memajukan industri batik Kulon Progo dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Hasil karya motif batik Gebleg Renteng ini dijadikan kebijakan Pemerintah untuk identitas bagi warga Kulon Progo khususnya untuk seragam Pegawai Negeri Sipil, seragam karyawan/karyawati BUMD, karyawan/karyawati wiraswasta Kulon Progo, serta seragam sekolah di Wilayah Kulon Progo. Kebijakan penggunaan Batik Gebleg Renteng ini dikeluarkan oleh Bupati Kulon Progo dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan pengrajin batik dikarenakan akan banyak permintaan produksi Batik Gebleg Renteng untuk pembuatan seragam serta baju-baju biasa.

> "Ada kebijakan penggunaan baju Batik Gebleg Renteng asli Kulon Progo. Ini untuk seluruh PNS, Karyawan/karyawati BUMD serta seragam sekolah, dipakai setiap Jum'at. Jadi untuk pelaksanaannya itu kita mengacu dengan Surat Edaran Bupati Kulon Progo tentang Penggunaan Batik Gebleg Renteng, kebijakan dari Bupati ini membantu produksi dan pemasaran para pengrajin dan pengusaha Batik." (Wawancara dengan Bp. Totok Sundoro, ST. Selaku KaSie Ekspor Impor Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 pada pukul 10.00 WIB)

Kebijakan penggunaan Batik Gebleg Renteng tertera dalam Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 025/2171 tanggal 2 Juli 2012 tentang Penggunaan Pakaian Batik Motif Gebleg Renteng. Kebijakan tersebut juga merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran Batik Gebleg Renteng. Batik Motif Gebleg Renteng ini sudah mendapatkan sertifikat hak cipta dari

Menteri Hukum dan HAM yaitu Sertifikasi Hak Cipta Batik Motif Gebleg Renteng No. C22201200068 tanggal 1 Agustus 2012. Serta sudah terbentuknya Asosiasi Batik Kulon Progo.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis pada hari Jum'at, 9 Februari 2018, pukul 10.30 WIB bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam Dinas Perdagangan mengenakan pakaian seragam dengan motif gebleg renteng yang tertera pada Surat Edaran tentang Penggunaan Batik Motif Gebleg Renteng sebagai identitas daerah. Selain itu setiap Dinas memiliki motif gebleg renteng yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwa Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan untuk pemakaian batik gebleg renteng sebagai pakaian kerja.

Gambar 2. Proses Produksi Batik Gebleg Renteng

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Gambar 3. Proses Produksi Batik Gebleg Renteng

Sumber : Dokumentasi Sembung Batik, Lendah, Kulon Progo

Sumber : Dokumentasi Sembung Batik, Lendah, Kulon Progo

Batik Gebleg Renteng ini hanya diproduksi oleh pengrajin-pengrajin batik di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Batik Gebleg Renteng hanya diproduksi dengan batik tulis, batik cap, maupun kombinasi antara keduanya.

Kebijakan Bupati Kulon Progo untuk penggunaan pakaian Batik Motif Gebleg Renteng ini merupakan suatu langkah pemasaran yang pasti bagi para pengrajin batik di Kulon Progo. Setiap tahun pasti ada permintaan Batik Motif Gebleg Renteng untuk PNS, pegawai BUMD, karyawan/karyawati swasta, serta sekolah-sekolah di wilayah Kulon Progo. Akan tetapi untuk saat ini pemasaran Batik Gebleg Renteng masih difokuskan di wilayah Kabupaten Kulon Progo dikarenakan digunakan masyarakat Kulon Progo sebagai ciri khas batik Kulon Progo.

Gambar 4. Seragam Batik Gebleg Renteng

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Dimulai pada tahun 2011, setiap tahun terjadi peningkatan produksi, omset dan nilai tambah bagi batik batik. Sampai saat ini terdaftar 17 pengrajin batik di Kulon Progo.

Tabel 6. Daftar Pengrajin Batik Kulon Progo

No	Pengrajin Batik	No	Pengrajin Batik
1	Batik Estin	10	Batik MDR
2	Yoga Batik	11	Batik Winoto Sastro
3	Batik Darminto	12	Batik Rania
4	Aricha Batik	13	Anugerah Batik
5	Batik Karina	14	Batik Pesisir Selatan
6	Batik Rojimin	15	Sembung Batik
7	Batik Farras	16	Widodo Indigo
8	Stin Batik	17	Tom Batik
9	Saraswati Batik		

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan pada hasil observasi hari Rabu, 21 Februari 2018, jam 11.00 WIB di Sembung Batik bahwa pekerja yang berada di Sembung Batik berkisar 20 warga lokal, baik pemuda maupun yang sudah tua. Para pemuda terutama laki-laki bekerja pada bagian pencucian dan pewarnaan kain batik. Pekerja muda perempuan beberapa bekerja di toko dan beberapa membantu dalam pewarnaan kain batik. Selain itu para ibu-ibu yang sudah tua bekerja dalam pembuatan motif batik.

Harga batik sendiri mulai dari Rp 80.000,- sampai dengan Rp 500.000,-. Pengunjung yang datang lebih banyak melihat dan memilih motif batik gebleg renteng. Hal ini membuktikan bahwa batik gebleg renteng sudah dikenal baik oleh masyarakat. Selain itu pada hasil observasi sistem manajerial dalam pengrajin batik menjadi lebih baik dan lebih tertata begitu pula dengan sistem manajerial sumberdaya manusianya. Hal ini dikarenakan sudah ada pembagian kerja secara efektif pada produksi dan pemasaran batik tersebut.

Grafik 1. Produksi Batik

Grafik 2. Omset dan Nilai Tambah Batik

Sumber : Dinas Perindustrian Kabupoaten Kulon Progo

Berdasarkan pada grafik diatas terjadi peningkatan produksi dan omset Batik Gebleg Renteng. Akan tetapi untuk data peningkatan produksi dan pemasaran dari tahun 2015 – 2017 belum ada data oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, seperti yang disampaikan narasumber dari Dinas Perdagangan Kulon Progo, sebagai berikut:

> "Untuk data peningkatan produksi dan pemasaran Batik di tahun 2015 sampai sekarang memang belum didata dan belum dirapikan datanya jadi sampai saat ini belum ada mbak" (Wawancara dengan Bp. Totok Sundoro, ST. Selaku KaSie Ekspor Impor Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 pada pukul 10.00 WIB)

Pemaparan dari Bp. Totok Sundoro tersebut membuktikan bahwa belom ada perbaikan sistem manajerial dalam pengelolaan pengrajin batik dari Dinas Perdagangan Kulon Progo baik untuk

pengembangan data bagi kantor sendiri maupun bagi para pengrajin. Selain itu Pemerintah Daerah dirasa kurang dalam pendampingan kepada pengrajin batik, hal ini disampaikan oleh narasumber pengrajin batik, sebegai berikut :

> "Pendampingan dari pemerintah saya rasa kurang yaa, apalagi lokasi saya berada pada ujung pojok selatan sendiri jadi mungkin kesusahan kalau mau kesini. Mungkin juga karna saya gak banyak produksi motif gebleg renteng. Ada asosiasi pengrajin batik tapi saya gak ikut. Sampai sekarang belom ada pendataan lagi dari pemerintah dan belom ada kegiatan pendampingan, sosialisasi atau seminar gitu untuk peningkatan aktivitas produksi dan pemasaran" (Wawancara dengan Bp. Widodo Selaku pemilik Tom Batik. Hari Ahad tanggal 18 Februari 2018 pada pukul 11.30 WIB)

Pendapat lain disampaikan oleh narasumber dari Sembung batik, sebagai berikut :

> "Kalau pendampingan saya rasa kurang. Tidak ada sosialisasi atau seminar-seminar gitu untuk pengrajin dan belom ada lagi pendataan dari Pemerintah. Tapi kalau untuk pemasaran itu biasanya dari sekolah-sekolah sama kantor-kantor banyak yang pesan Batik Gebleg Renteng disini. Jadi produksi Batik Gebleg Renteng itu masih untuk daerah sendiri saja belum keluar daerah" (Wawancara dengan Ibu Sugirin, Sembung Batik. Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pada pukul 11.00 WIB)

Hasil wawancara diatas membuktikan benar bahwa belum adanya pendataan ulang dan masih kurangnya pendampingan dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. Pelaksanaan program Batik Gebleg Renteng serta penelitian dalam

pelaksanaan produksi dan pemasaran Batik Gebleg Renteng ini pada dasarnya berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan produksi batik pada tahun sebelumnya. Batik Gebleg Renteng sudah berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diinginkan oleh Bupati Kulon Progo.

> "Setelah adanya motif batik gebleg renteng dan ada kebijakan dibuat seragam itu memang manfaatnya terasa sekali bagi pengrajin-pengrajin batik, karena setiap tahun pasti akan ada pesanan dan bisa jadi penghasilan yang pasti setiap tahunnya. Setelah itu juga banyak wisatawan luar daerah bahkan luar negeri yang jauh jauh datang kesini hanya untuk membeli langsung" (Wawancara dengan Ibu Sugirin, Sembung Batik. Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pada pukul 11.00 WIB)

Menurut penelitian yang telah dilakukan, program Batik Gebleg Renteng ini telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat maupun bagi kemajuan daerah. Dampak dari strategi kebijakan dari Bupati Kulon Progo ini yaitu baik warga Kulon Progo maupun warga luar Kulon Progo sudah banyak mengenali motif Batik Gebleg Renteng serta semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pengrajin batik di wilayah Kulon Progo. Meningkatnya industri Batik Gebleg Renteng juga meningkatkan tingkat kesejahteraan baik melalui lapangan pekerjaan maupun meningkatkan perputaran ekonomi rakyat. Selain itu program ini sangat membantu perputaran ekonomi daerah serta menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo.

Akan tetapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat kekurangan yaitu kurangnya intensitas pendampingan yang dilakukan Pemerintah Daerah setelah kemajuan Batik Gebleg Renteng ini disebabkan belum adanya pencatatan kembali untuk pembinaan pengrajin-pengrajin industri batik di Wilayah Kulon Progo. Sedangkan pada aktivitas peningkatan produksi dan peningkatan keuntungan tergantung dari pengrajin-pengrajin batik. Akan tetapi akan lebih baik apabila Pemerintah dapat membantu meningkatkan motivasi pengrajin dalam hal pengembangan dan produksi batik dengan adanya seminar.

2. Produksi dan Pemasaran Beras Daerah (RASDA)

Beras Daerah (RASDA) yang selanjutnya akan ditulis RASDA merupakan desentralisasi atau perbaikan tata kelola Beras Miskin (RASKIN) yang dikelola oleh BULOG. Perbaikan tata kelola RASKIN menjadi RASDA ini merupakan perwujudan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengamanatkan bahwa dalam mewujudkan keterjangkauan pangan salah satunya adalah dengan melaksanakan kebijakan di bidang bantuan pangan.

Oleh karena ini dengan semangat Gerakan Bela Beli Kulon Progo sebagai salah satu upaya penguatan ekonomi lokal dalam mempersiapkan MEA, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mewujudkan dengan program desentralisasi RASKIN menjadi RASDA untuk program bantuan pangan yang memandirikan rakyat

sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif. Program RASDA ini merupakan semangat dari *"Madhep Mantep Mangan Pangane Dhewe"* (siap dan mantap dengan makanan yang dihasilkan sendiri) sesuai dengan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang berarti gerakan membela dan membeli produk lokal.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengangkat program desentralisasi RASKIN menjadi RASDA ini dikarenakan beberapa sebab, yaitu lapangan usaha dan lapangan kerja di Kulon Progo yang dominan pada sektor pertanian, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi serta pendapatan perkapita Kulon Progo yang masih relatif rendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu ternyata dimulai dari tahun 2013 tercatat terjadinya surplus beras di Kulon Progo. Kondisi RASKIN yang diperoleh dari Bulog sering berkualitas buruk dengan beras yang dijual di pasaran.[43]

Tabel 7. Penyediaan dan Kebutuhan Beras

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Padi GKG (ton)	114.702	122.613	126.989	116.453
2	Produksi Beras (ton)	72.837	76.927	80.003	73.356

[43]Panduan "Mengganti RASKIN menjadi RASDA di Kabupaten Kulon Progo" Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo (Pangan, 2017)

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
3	Kebutuhan Beras (ton)	38.085	32.094	33.063	34.465
4	Sisa lebih/Surplus beras (ton)	34.800	44.833	46.940	38.720
5	Jumlah Penduduk (jiwa)	480.247	405.222	417.473	437.441
6	Konsumsi (Kg/kap/th)	79,2	79,2	79,2	79,2

Sumber : Data Dokumen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

Mengatasi analisis permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat program perbaikan tata kelola RASKIN menjadi RASDA dimana beras yang didistribusikan untuk keluarga miskin di Kulon Progo berasal dari beras petani lokal Kulon Progo sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kulon Progo. Inovasi pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini diharapkan mampu untuk membangun kepercayaan publik terhadap potensi Kabupaten Kulon Progo dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan penguatan ekonomi lokal Kulon Progo. Manfaat dalam program ini yaitu :

a. Meningkatkan kualitas beras yang digunakan untuk distribusi RASDA.

b. Memberdayakan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Kulon Progo.
c. Meningkatkan pendapatan petani Kabupaten Kulon Progo.
d. Memperpendek rantai distribusi, serta
e. Menggerakan perekonomian daerah.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan Bulog Drive DIY dalam rangka pengadaan beras program RASDA Kulon Progo yang diproduksi petani Kulon Progo melalui Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam MOU Nomor 501/7496 dan MOU-01/12000/XII/2013. MOU tersebut berisikan perjanjian kesanggupan pengadaan beras miskin antara Gapoktan dengan Bulog Drive DIY. Masa kontrak perjanjian pengadaan beras dari GAPOKTAN berlangsung selama 1 (satu) tahun dan akan diadakan perpanjangan setiap tahunnya dengan pertimbangan-pertimbangan antara GAPOKTAN dengan BULOG Drive DIY.

> "Ada perjanjian kesanggupan dengan Bulog dan perjanjian kontraknya itu setahun dan setiap tahun diperbaharui antara GAPOKTAN dengan BULOG. Kalau ada yang tidak melanjutkan berati tidak memperpanjang kontrak dengan BULOG." (Wawancara dengan Bapak Nur Rohim selaku Ketua GAPOKTAN Panca Manunggal, Sogan, Wates, Kulon Progo. Hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 13.30 WIB)

GAPOKTAN Kulon Progo yang bekerjasama sebagai pelaksana RASDA total ada 8 (delapan) GAPOKTAN yang berada di Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebagai berikut :

Tabel 8. Data GAPOKTAN Suplyer RASDA dan Beras PNS

No	Nama GAPOKTAN	No	Nama Gapoktan
1	GAPOKTAN Panca Manunggal	5	GAPOKTAN Sidomaju
2	GAPOKTAN Ngestiharjo	6	GAPOKTAN Sari Mulyo
3	GAPOKTAN Makmur Sejahter	7	GAPOKTAN Sumber Makmur
4	GAPOKTAN Among Tani	8	GAPOKTAN Guyub Rukun

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo

Strategi untuk produksi dan pemasaran RASDA ini adalah dengan meningkatkan kualitas beras yang akan didistribusikan ke Bulog untuk Keluarga Miskin Kulon Progo. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo Nomor 188/1679 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Standart Mutu Beras Daerah Kabupaten Kulon Progo diterbitkan sebagai panduan standart mutu beras daerah untuk peningkatan kualitas beras yang akan didistribusikan. Peningkatan kualitas standart mutu beras dibantu Pemerintah Daerah dengan pengadaan fasilitas serta pemberdayaan

GAPOKTAN untuk produksi beras dari mulai panen sampai pengemasan.

Adanya dukungan fasilitas dan dana pemberdayaan dari Pemerintah Daerah ini diharapkan akan meningkatan kualitas pengemasan beras yaitu kemasan beras yang bagus serta bertuliskan merek dari GAPOKTAN Kulon Progo. Selain itu Pemerintah Daerah juga memfasilitasi pembuatan sertifikasi mutu beras serta sertifikasi kelayakan untuk setiap GAPOKTAN yang bekerjasama dengan Bulog. Untuk fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sendiri selain fasilitas ekonomi atau dana permodalan, GAPOKTAN RASDA juga mendapatkan fasilitas berupa alat untuk produksi beras.

Dalam hal pemberdayaan para petani dari GAPOKTAN ini mendapatkan sosialisasi serta penyuluhan untuk produksi beras daerah. Sosialisasi atau penyuluhan ini diadakan apabila standar baru untuk beras. Pendampingan rutin dari Dinas Pertanian dan Pangan dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali, sedangkan penyuluhan diadakan apabila ada peraturan baru atau sosialisasi teknik pertanian dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dari narasumber GAPOKTAN RASDA, sebagai berikut :

> "GAPOKTAN Among Tani ini pernah diberikan fasilitas alat dan bantuan dana modal oleh Pemerintah Daerah berupa Gilingan Padi. Kalau modal dananya banyak produksi berasa bisa banyak, kalau tidak itu tergantung. Untuk pendampingan

ada setiap 3 bulan sekali dari penyuluh yang ditugaskan di setiap Gapoktan" (Wawancara dengan Ketua GAPOKTAN Among Tani, Kedundang, Temon, Kulon Progo. Hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pada pukul 10.30).

Tabel 9. Daftar Dukungan Fasilitasi Pemerintah

No	Nama GAPOKTAN	Dukungan/Fasilitasi		
		2014	2015	2016
1	Panca Manunggal	Rev RMU Rp 195.000.000 Dryer Rp 180.000.000		
2	Makmur Sejahtera	Rev RMU Rp 195.000.000		
3	Among Tani		Rev RMU Rp 195.000.000	
4	Sido Maju		Rev RMU Rp 195.000.000	Bangunan Dryer Rp187.000.000
5	Sari Mulyo		Rev RMU Rp 195.000.000	
6	Ngesti Harjo		Rev RMU Rp 195.000.000	

Sumber : Data Dokumen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

"Kemarin ini kita ada penyuluhan sertifikasi mutu dari BKPP Jogja, tapi disini belom menerapkan sertifikasi mutu itu. Pengusaha kami keberatan kalau ada pemisahan menir dengan

beras karena efeknya limbah menir tidak tau mau dibuang kemana, jadi obrolan kita itu selama ini masih enak seperti sekarang gak maju ke premium apa medium, yang penting mengikuti arah jual pasar agar bisa selalu memasarkan. Premium memang meningkatkan harga juga tetapi belum ada tempat pembuangan limbah menir" (Wawancara dengan Bapak Nur Rohim selaku Ketua GAPOKTAN Panca Manunggal, Sogan, Wates, Kulon Progo. Hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 13.30 WIB)

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, terdapat kendala yang masih dirasakan pelaksana (GAPOKTAN) selama ini yaitu apabila kualitas beras akan ditingkatkan ke tingkatan premium maupun medium maka pastinya memerlukan alat yang baru lagi. Akan tetapi kendalanya bukan berada pada alatnya tetapi pada pembuangan limbah meninrnya. Selain itu GAPOKTAN juga mengharapkan agar harga jual RASDA bisa sesuai dengan HPP.

Gambar 5. Skema Kerja Rasda

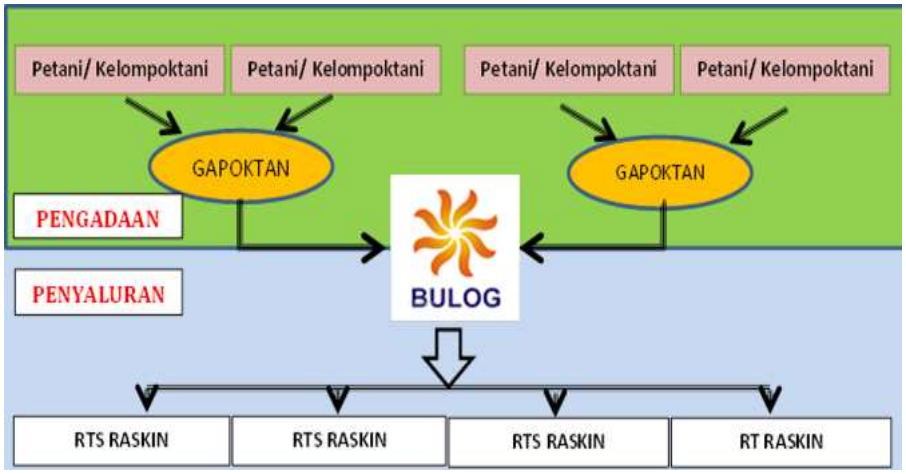

Sumber : Data Dokumen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

Seperti terlihat pada skema kerja RASDA diatas, pengadaan beras dilakukan oleh GAPOKTAN, kemudian GAPOKTAN menyalurkan kepada BULOG. Setelah beras didistribusikan ke BULOG oleh GAPOKTAN maka selanjutnya BULOG akan menyalurkan RASDA kepada RTS RASKIN Kabupaten Kulon Progo. Hasil pendapatan dari pengadaan beras yang diperoleh GAPOKTAN berasal dari BULOG dengan harga sesuai dengan harga jual pada saat itu. Maka disini akan terjadi perputaran uang antara BULOG dengan GAPOKTAN serta petani-petani.

Grafik 3. Realisasi RASDA

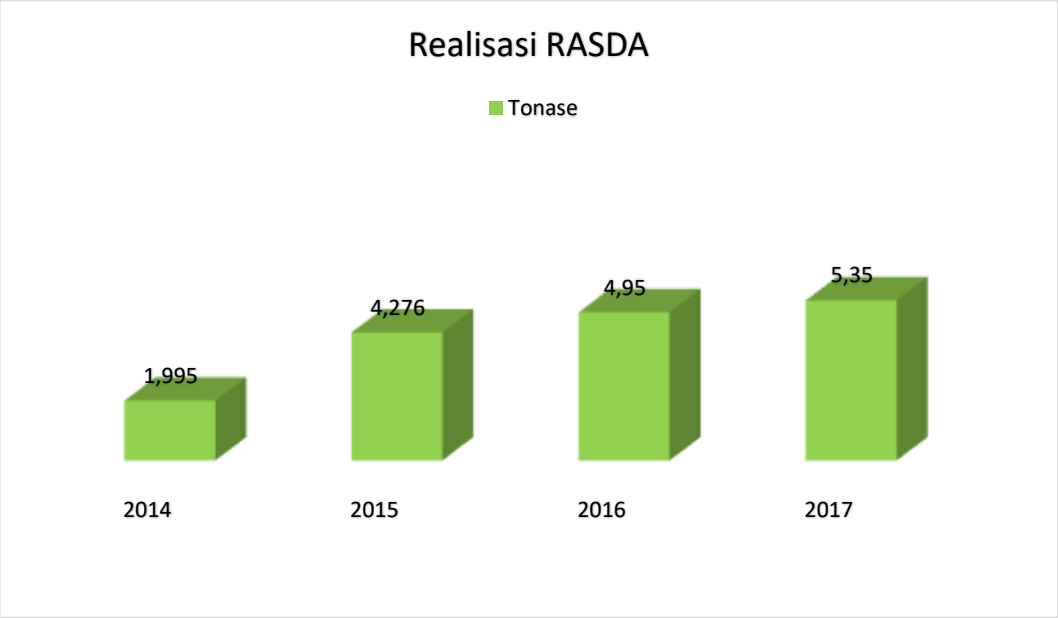

Sumber : Data Dokumen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

Grafik 3.3 diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan produksi RASDA dari GAPOKTAN setiap tahunnya. Peningkatan

produksi RASDA secara tidak langsung juga akan membantu meningkatkan perputaran uang di Kabupaten Kulon Progo terutama untuk masyarakat. Selain itu, secara bertahap selalu ada peningkatan nilai rupiah yang beredar.

Grafik 4. Nilai Rupiah yang Beredar

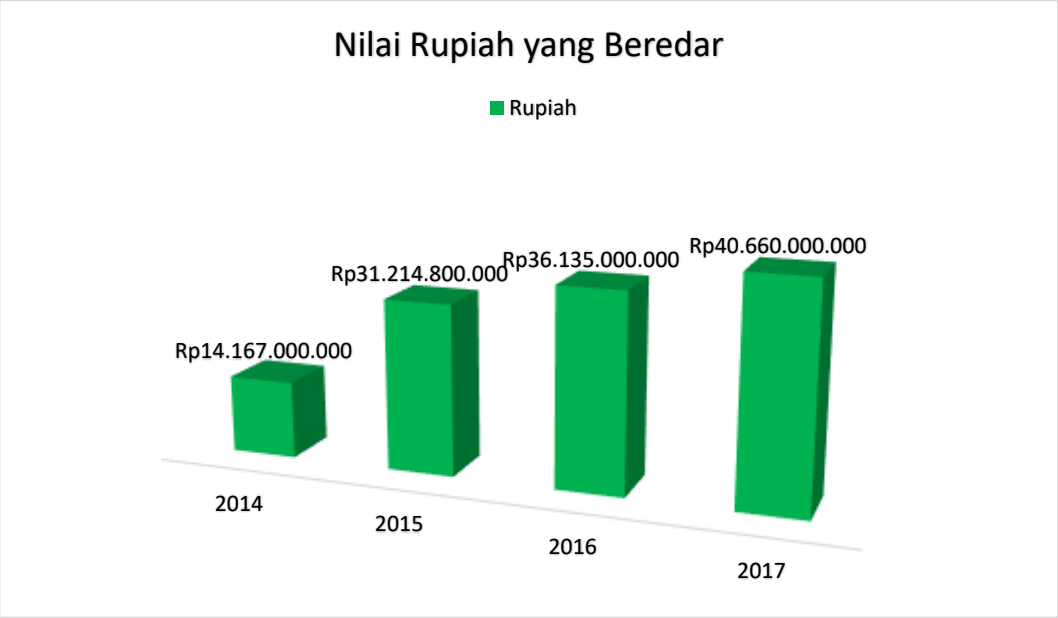

Sumber : Data Dokumen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo..

Grafik 3.4 diatas menunjukkan bahwa program desentralisasi RASKIN menjadi RASDA yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah Kulon Progo ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan semakin memperkuat peningkatan ekonomi lokal dan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kulon Progo. Desentralisasi RASKIN menjadi RASDA di Kabupaten Kulon Progo ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016.

Berdasarkan pada observasi yang dilakukan terhadap tempat produksi beras pada hari Selasa, 20 Februari 2018, jam 14.00 WIB menunjukkan bahwa adanya fasilitas alat yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah di GAPOKTAN Panca Manunggal. Alat yang digunakan telah lengkap sampai dengan alat untuk pengemasan beras pada beras daerah tersebut. Selain itu ada 10 pekerja yang membantu dalam produksi beras daerah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa telah membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan mempekerjakan beberapa warga lokal untuk produksi.

Gambar 6. Alat Pengering Gabah

Sumber : Dokumentasi Observasi Peneliti Tanggal 20 Februari 2018, 14.00 WIB

Gambar 7. Tempat Pengeringan Gabah

Sumber : Dokumentasi Observasi Peneliti Tanggal 20 Februari 2018, 14.00 WIB

Sumber : Dokumentasi Observasi Peneliti Tanggal 20 Februari 2018, 14.00 WIB

Gambar 8. Alat Pengemasan Beras

Sumber : Dokumentasi Observasi Peneliti Tanggal 20 Februari 2018, 14.00 WIB

Berdasarkan pada penelitian terhadap pelaksanaan program RASDA yang telah dilaksanakan. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program RASDA ini telah berjalan dengan baik serta sesuai dengan standar dan tujuan yang diharapkan. Baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat mendukung serta mewujudkan tujuan dari program ini. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah

dengan masyarakat ini membantu kelancaran serta ketercapaian tujuan dari RASDA itu sendiri.

Melihat dari data yang telah disajikan penulis diatas bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah beserta GAPOKTAN telah berusaha mewujudkan pemenuhan beras dibuktikan dengan kenaikan produksi beras. Meskipun terkadang tidak bisa memenuhi target dari Bulog serta Dinas Pertanian dan Pangan tetapi tetap terjadi peningkatan pada setiap tahunnya.

Dampak dari RASDA ini telah dirasakan oleh para petani yang tergabung dalam GAPOKTAN di Kulon Progo. Adanya kepastian penjualan pada setiap tahunnya telah membantu memotivasi para petani untuk terus bekerja tanpa takut adanya kerugian. Selain itu, program ini membuat petani merasa nyata diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini membuktikan terwujudnya tujuan menyejahterakan petani Kulon Progo serta memandirikan masyarakat Kulon Progo.

3. Pembelian Beras Asli Kulon Progo oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kulon Progo (Beras PNS)

Program Beras PNS ini merupakan salah satu inovasi Gerakan Bela-Beli Kulon Progo dalam konteks pertanian dan pangan dengan slogan *"Madhep Mantep Mangan Pangane Dhewe"*(siap dan mantap dengan makanan yang dihasilkan sendiri). Program Beras PNS ini

dimaksudkan agar PNS memberi contoh kepada masyarakat dengan mencintai dan membeli produk lokal Kulon Progo.[44] Program Beras PNS merupakan kebijakan dari Bupati Kulon Progo melalui Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 500/5231 Tahun 2015 tentang Program Beras Pegawai Negeri Sipil.

Program Beras PNS ini juga merupakan perwujudan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengamanatkan bahwa dalam mewujudkan keterjangkauan pangan salah satunya adalah dengan melaksanakan kebijakan di bidang bantuan pangan. Beras PNS ini menjadi salah satu langkah mewujudkan bantuan pangan baik bagi petani yang merupakan produsen serta PNS yang merupakan konsumen.

Pada Surat Edaran tersebut dituliskan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani, maka seluruh PNS dan karyawan/karyawati BUMD di Kabupaten Kulon Progo dihimbau untuk membeli beras "SEHAT" produksi GAPOKTAN Kulon Progo. Beras "SEHAT" dijual dengan kemasan 5 (lima) kilogram dengan harga menyesuaikan pasar. Sasaran dari Beras PNS adalah seluruh PNS Kabupaten Kulon Progo dapat membeli beras "SEHAT" yang berasal dari Kulon Progo minimal 10 (sepuluh) kilogram setiap bulannya.

---

[44] Dr. Hasto Wardoyo, *Praktek Sederhana Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif,* Yogyakarta. Hlm. 8 (Wardoyo, 2015)

Beras “SEHAT” tersebut dihasilkan oleh petani dari sawah yang berada di wilayah Kulon Progo. Hasil panen padi yang diperoleh dari GAPOKTAN ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani di setiap GAPOKTAN dan pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perputaran uang dari hasil produksi Beras PNS ini juga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kulon Progo.

> “Pertamanya belum ada kseragaman kualitas beras jadi dari Pemerintah ada penyuluhan, pendampingan dan pengawasan untuk pemantauan sertifikasi dan pelabelan beras supaya sesuai dengan standar produksi beras pada umumnya.” (Wawancara dengan Ibu Ambar Utami, Tim Pemantau Beras Daerah dan Beras PNS, Bidang Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Hari Rabu, 21 Februari 2018 pada pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan pada hasil wawancara pada awalnya memang belum ada keseragaman kualitas Beras PNS dan belum semua GAPOKTAN produsen Beras PNS memiliki sertifikasi dan pelabelan prima serta belum adanya panduan standart kualitas Beras PNS yang digunakan GAPOKTAN maupun petugas monitoring dan pemantauan. Maka Pemerintah daerah melakukan bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi sertifikasi dan pelabelan prima. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas beras PNS supaya sesuai dengan standart produksi beras pada umumnya yang kemudian meningkatkan hasil produksi dan pemasaran Beras PNS.

> “Pemasaran Beras PNS dilakukan dikalangan PNS sesuai dengan Surat Edaran Bupati bahwa setiap PNS dihimbau untuk beli minimal 5 Kg setiap bulannya.” (Wawancara dengan Ibu Ambar Utami, Tim Pemantau Beras Daerah dan Beras PNS, Bidang Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Hari Rabu, 21 Februari 2018 pada pukul 10.00 WIB)

> “Kalau sistemnya itu setiap UPD/SKPD pesan sejumlah kebutuhan beras dari kantor tersebut. UPD/SKPD itu pesan langsung ke GAPOKTAN yang bersangkutan. Kalau GAPOKTAN Panca Manunggal itu yang pesan dari Kantor Pemerintahan Daerah, nanti setiap GAPOKTAN beda-beda UPD/SKPD. Kalau untuk harganya itu mengikuti harga pasar dengan selisih Rp 500,-“ (Wawancara dengan Bp. Margiono dari GAPOKTAN Panca Manunggal, selaku Koordinator GAPOKTAN Beras PNS. Hari Senin, 02 April 2018 pada pukul 11.30 WIB

Untuk pemasarannya, seluruh PNS dan karyawan/karyawati BUMD di Kabupaten Kulon Progo dihimbau untuk membeli beras produksi Gapoktan Kulon Progo dengan kemasan 5 (lima) Kg dengan harga menyesuaikan pasar. Sedangkan mekanisme pemesanan dan pembayaran dilakukan oleh masing-masing SKPD/Instansi/BUMD dengan menghubungi koordinator GAPOKTAN Beras Daerah yaitu GAPOKTAN Panca Manunggal. Kemudian realisasi pemesanan beras perbulan diberikan kepada Tim Pemantau Beras PNS dan Beras Daerah Kabupaten Kulon Progo yaitu Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> “Program ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada petani Kulon Progo sebagai produsen. Program ini membuat kepastian bagi para petani, kepastian konsumen yang sudah pasti didistribusikan ke Bulog serta kepada PNS serta tidak dirugikan malah meningkatkan pendapatan petani karena kepastian

konsumen itu. Pemerintah sudah memberikan kepedulian yang sangat besar melalui GAPOKTAN RASDA dan Beras PNS ini" (Wawancara dengan Bp. Margiono dari GAPOKTAN Panca Manunggal, selaku Koordinator GAPOKTAN Beras PNS. Hari Senin, 02 April 2018 pada pukul 11.30 WIB

Berdasarkan pada wawancara diatas bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan kepedulian yang besar bagi petani Kulon Progo melalui GAPOKTAN dan program Beras PNS ini. Sehingga petani merasa termotivasi untuk terus memproduksi beras tanpa takut tidak laku terhadap berasnya. Hal tersebut disebabkan dikarenakan adanya kepastian konsumen yang dapat meningkatkan pendapatan petani.

Grafik 5. Realisasi Beras PNS

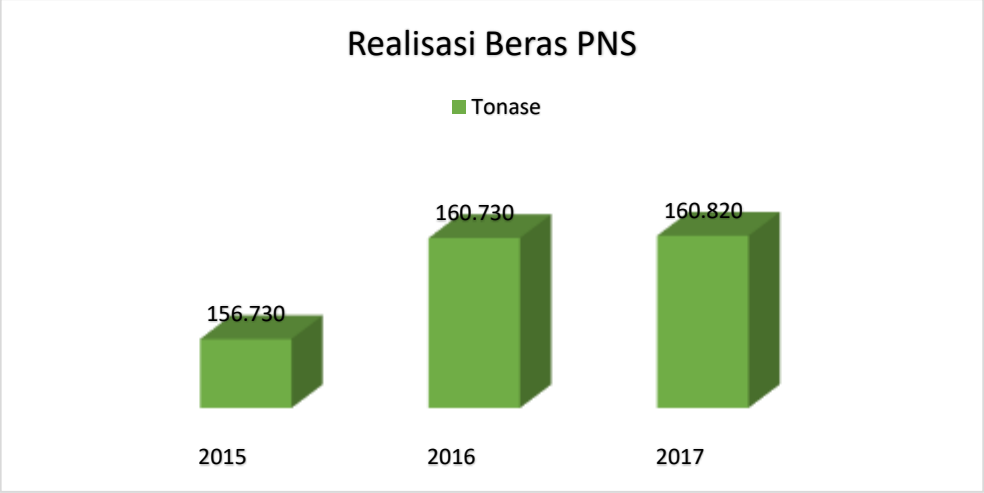

Sumber : Data Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Realisasi pelaksanaan program Beras PNS dari Tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami peningkatan meskipun tidak banyak. Peningkatan tersebut menandakan bahwa hampir selurus PNS dan karyawan/karyawati BUMD Kabupaten Kulon Progo sudah ikut serta merealisasikan kebijakan Beras PNS. Data realiasi yang didapatkan

dari Tim Pemantau Beras PNS dan Beras Daerah ini membuktikan bahwa adanya kenaikan permintaan dan penjualan Beras PNS setiap tahunnya yang dapat diartikan bahwa kualitas Beras PNS semakin baik sehingga pembelian Beras PNS semakin meningkat setiap tahun dan juga kesadaran PNS untuk semakin mencintai dan membeli produk lokal hasil daerah sendiri. Peningkatan produksi dan pembelian Beras "SEHAT" oleh PNS Kulon Progo dan karyawan/karyawati BUMD Kulon Progo membuktikan bahwa adanya kontribusi yang baik dari PNS serta karyawan/karyawati BUMD terhadap kemajuan dan kemandirian Kulon Progo.

Berdasarkan pada observasi yang dilakukan terhadap tempat produksi beras pada hari Selasa, 20 Februari 2018, jam 14.00 WIB menunjukkan bahwa adanya fasilitas alat yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah di GAPOKTAN Panca Manunggal. Alat yang digunakan telah lengkap sampai dengan alat untuk pengemasan beras pada beras daerah tersebut. Selain itu ada 10 pekerja yang membantu dalam produksi beras daerah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa telah membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan mempekerjakan beberapa warga lokal untuk produksi.

Alat Pengering Gabah

Sumber : Dokumentasi Observasi Peneliti Tanggal 20 Februari 2018, 14.00 WIB

Tempat Pengeringan Gabah

Sumber : Dokumentasi Observasi Peneliti Tanggal 20 Februari 2018, 14.00 WIB

Alat Pengemasan Beras

Sumber : Dokumentasi Observasi Peneliti Tanggal 20 Februari 2018, 14.00 WIB

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Beras PNS ini berjalan dengan baik dan lancar. Program Beras PNS ini sangat bermanfaat untuk petani-petani Kulon Progo serta telah meningkatkan kesejahteraan para petani, seperti yang disampaikan oleh narasumber dari GAPOKTAN Panca Manunggal diatas. Hal ini juga membuktikan bahwa terdapat komunikasi dan koordinasi yang baik yang menciptakan keselarasan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat untuk pelaksanaan program RASDA dan Beras PNS.

4. Produksi dan Pemasaran Air-Ku

Kulon Progo merupakan daerah yang mempunyai cukup banyak sumberdaya alam, salah satunya adalah sumber mata air yang cukup banyak, akan tetapi pemanfaatannya hanya sebatas air untuk kebutuhan sehari-hari saja belum dimanfaatkan untuk air minum yang bisa dikonsumsi.[45] Jumlah mata air yang cukup banyak ini dijadikan strategi oleh Bupati Kabupaten Kulon Progo, Bapak Hasto Wardoyo untuk menjadi salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penguatan ekonomi lokal Kulon Progo.

> "Tujuan Air-Ku ini sebenarnya di inisiasi oleh Pak Hasto, bahwa beliau prihatin kalau kita pingin minum saja harus beli dari asing. Kenapa kalau air minum kita harus buang duit untuk asing, jadi kita buat sendiri saja"(Wawancara dengan Bapak Meirianto, selaku penanggung jawab Air-Ku di PDAM Tirta

[45] Ibid.,hlm.9

Binangun Kabupaten Kulon Progo. Hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 pukul 9.30)

Apabila ternyata daerah sendiri memiliki sumber mata air yang bisa digunakan untuk air mineral kemasan kenapa harus membeli air kemasan dari luar daerah. Seperti yang sudah disampaikan pada latar belakang bahwa Kulon Progo merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan diatas rata-rata di Provinsi Yogyakarta maka akan lebih baik apabila Kulon Progo dapat menghasilkan produk air minum sendiri yang nantinya akan berpengaruh dalam hal perputaran ekonomi di Kulon Progo sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.

Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Kulon Progo pada pasal 5 ayat 1 dituliskan tujuan PDAM adalah memenuhi kebutuhan air besrih dan/atau air minum guna meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan mendukung Pendapatan Asli Daerah. Pada pasal 6 huruf b dituliskan tugas pokok PDAM adalah menghimpun dana guna pengembangan dan menjaga kelangsungan hidup PDAM serta pada pasal 7 huruf c dituliskan bahwasanya PDAM mempunyai fungsi mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu, melalui Gerakan Bela Beli Kulon Progo dengan mewujudkan slogan *"Madhep Mantep Ngombe Banyune Dhewe"* (siap dan mantap minum air yang dihasilkan sendiri), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bidang perairan yang dimiliki Kulon Progo yaitu PDAM Tirta Binangun memproduksi air mineral dalam kemasan dengan nama "Air-Ku". Air-Ku ini bergerak sesuai landasan hukum diatas guna meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan mendukung Pendapatan Asli Daerah. Apabila terjadi peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo maka akan membantu untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 9. Produk AMDK Kulon Progo "Air-Ku"

Sumber : PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo

Air-Ku diartikan sebagai Air – Kulon Progo atau *Banyu Ku* (Air-Ku). Bahan baku dalam air mineral Air-Ku tersebut berasal dari mata air asli Kulon Progo. Bahan baku yang berasal dari daerah sendiri dan penjualan yang berada di daerah sendiri sehingga semakin berkembangnya perputaran uang di daerah sendiri. Selain itu kedepannya Air-Ku ini akan menjadi anak perusahaan dari PDAM Tirta Binangun Kulon Progo.

> "Kita sudah ada standart mutu untuk Air-Ku, standart mutu yang kami pakai yaitu Standart Manajemen Mutu ISO, SNI ini untuk standart air minum dalam kemasan, yaitu SNI, ijin edar dari POM dan yang terakhir adalah ijin halal"(Wawancara dengan Bapak Meirianto, selaku penanggung jawab Air-Ku di PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 pukul 9.30)

Unit usaha air minum dalam kemasan ini didirikan pada tahun 2012 yang berlokasi di kawasan pengolahan air minum milik PDAM Tirta Binangun di Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo. Bersumber dari mata air clereng yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari unit produksi dengan dukungan tenaga kerja, unit usaha ini memproduksi air minum kemasan dengan varian, gelas, botol dan galon. Setelah mulai berdiri pada tahun 2012, pada tahun 2013 Air-Ku telah lolos uji penjaminan mutu produk dan sudah memiliki acuan

normatif yang resmi. Berikut adalah pedoman mutu dari Air-Ku yang sudah di sertifikasi, yaitu :[46]

a. SNI ISO 9000:2008: SMM - Dasar-dasar dan Kosa kata
b. SNI ISO 9001:2008: SMM – Persyaratan
c. SNI 01-3553-2006: Air Minum Dalam Kemasan
d. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
e. BPOM RI MD 265212002006 (Cup/Gelas)
f. BPOM RI MD 265212002006 (Galon)
g. BPOM RI MD 265212003006 (Botol)
h. HALAL MUI No. 12160004751216

PDAM Tirta Binangun diharapkan dapat melayani seluruh kebutuhan konsumsi air minum dalam kemasan khususnya di wilayah Kulon Progo melalui Air-Ku sebagai ikon Kulon Progo yang patut untuk dibela dengan membeli produk hasil inovasi dari Kulon Progo.

> "Pada permulaan mulai itu tahun 2012 tapi masih proses promosi dengan harga jual pabrik dan dipromosikan ke instansi-instansi serta acara pernikahan atau kematian di Kulon Progo. Selain itu kita ada promosi juga waktu Manunggal Fair (Pameran perayaan hari jadi Kabupaten Kulon Progo)." (Wawancara dengan Bapak Meirianto, selaku penanggung jawab Air-Ku di PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 pukul 9.30)

[46] Data Air Minum Dalam Kemasan 2017 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Hlm.9 (Binangun, 2017)

Air-Ku ini sudah mulai diproduksi pada tahun 2012 akan tetapi masih sebatas dipromosikan saja dengan harga jual sesuai dengan harga pabrik. Proses perijinan Air-Ku ini berjalan dari tahun 2012 – 2014 sehingga pada tahun-tahun tersebut Air-Ku digunakan untuk sebatas promosi saja. Sasaran promosi Air-Ku pada saat itu pun masih sebatas pada SKPD di Kabupaten Kulon Progo,event-event pernikahan serta acara-acara lainnya di wilayah Kulon Progo.

Pada masa promosi tersebut PDAM Tirta Binangun membuka stand pada pameran HUT Kabupaten Kulon Progo, memberikan bantuan air kemasan kepada masyarakat sebagai salah satu pengenalan produk, serta dipromosikan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. [47] Dalam pemasarannya PDAM Tirta Binangun bekerjasama dengan PERUMDA Aneka Usaha yang merupakan salah satu BUMD Kulon Progo. Kemudian PERUMDA Aneka Usaha serta Koperasi Tirta Sari milik PDAM Tirta Binangun yang mendistribusikan atau memasarkan produk Air-Ku dan PDAM Tirta Binangun yang memproduksi Air-Ku. Pada saat itu Air-Ku hanya bisa dibeli melalui Perumda Aneka Usaha salah satunya di POM Bensin Jl. Ahmad Dahlan, Wates milik Perumda Aneka Usaha dan di PDAM Tirta Binangun.

> "Dulunya hanya bermitra dengan PERUMDA Aneka Usaha, salah satu BUMD Kulon Progo. PERUMDA Aneka Usaha yang memasarkan, PDAM yang memproduksi. Berjalannya waktu akhirnya dibuka agen untuk bermitra kulakan Air-Ku ke PDAM.

[47] Ibid.,hlm.13

> Ada 83 agen tapi yang aktif rutin hanya sekitar 20%" (Wawancara dengan Bapak Meirianto, selaku penanggung jawab Air-Ku di PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 pukul 9.30)

Pada awal pendirian strategi pemasaran hanya melalui promosi dan himbauan dari Bupati Kabupaten Kulon Progo untuk setiap acara yang diadakan SKPD di Wilayah Kabupaten Kulon Progo menggunakan Air-Ku dan hanya bermitra dengan Perumda Aneka Usaha. Promosi juga dilakukan untuk event-event daerah, acara pernikahan atau kematian yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Seiring berjalannya waktu mulai dibuka agen untuk bermitra Air-Ku dengan PDAM Tirta Binangun. Sampai saat ini sudah terdapat 83 agen akan tetapi yang rutin melakukan transaksi hanya sekitar 20% dari total seluruh agen. Adanya agen tersebut telah memudahkan penjualan Air-Ku ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi dimana pada awal pendirian pada satu hari hanya memproduksi kurang lebih 40 karton sampai saat ini setiap harinya bisa memproduksi 400 karton.

PDAM Tirta Binangun terus meningkatkan kualitas produk Air-Ku sehingga Air-Ku semakin meningkat produksi dan konsumennya. Pada tahun 2018 pemerintah kabupaten kulon progo akan mendatangkan mesin untuk produksi air minum kemasan untuk varian

gelas.Akan tetapi produk Air-Ku ini belum dijual di luar daerah, dimana kemungkinan apabila sudah sampai tingkat nasional dapat sangat meningkatkan ekonomi keuangan daerah.

Tabel 10. Volume Produksi AMDK Air-Ku

No.	Produk	Volume/Pcs	Jumlah/Box	Harga Jual/Box	Volume Produksi/Jam
1	Cup/Gelas	240 ml	48 pcs	Rp 14.000	50 Box
2	Galon	19 ltr	1 bh	Rp 10.000	40 Galon
3	Botol	600 ml	24 pcs	Rp 30.000	2000 s.d 2500 Botol

Sumber : Data AMDK Air-Ku PDAM Tirta Binangun Kulon Progo Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan produksi Air-Ku. Dimana pada masa awal hanya menghasilkan 40 karton sedangkan saat ini dapat menghasilkan 50 karton per jamnya. Hal ini membuktikan bahwa. Sedangkan untuk galon dapat menghasilkan 40 Galon per jam dan untuk botol dapat menghasilkan 2000 sampai 2500 botol setiap jam.

Untuk tempat produksi Air-Ku sendiri diproduksi di pabrik yang berada di daerah Clereng, Pengasih Kulon Progo. Sejauh ini pabrik yang dimiliki untuk produksi Air-Ku hanya 1 (satu) dikarenakan area distribusi masih sebatas wilayah Kulon Progo saja, belum merambah ke daerah lain. Pekerja di pabrik pun hanya 10 (sepuluh) pekerja sampai saat ini.

> "Dulu pekerja hanya 5 orang saja dari awal berdiri tahun 2012 – 2014, itu dari PDAM, kemudian diberdayakan warga lokal Clereng, sampai sekarang total 10 (sepuluh) orang dari penduduk, walaupun pekerja masih 10 orang tetapi masih efektif" (Wawancara dengan Bapak Meirianto, selaku penanggung jawab Air-Ku di PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 pukul 9.30)

Berdasarkan pada wawancara diatas, pekerja untuk AMDK Air-Ku ada 15 orang pekerja dari warga lokal serta dari PDAM Tirta Binangun. Hal tersebut merupakan perwujudan dari menyejahterakan masyarakat, dari yang awalnya pengangguran setelah adanya pabrik tersebut masyarakat menjadi mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja pabrik.

Grafik 6. Data Penjualan AMDK Air-KU

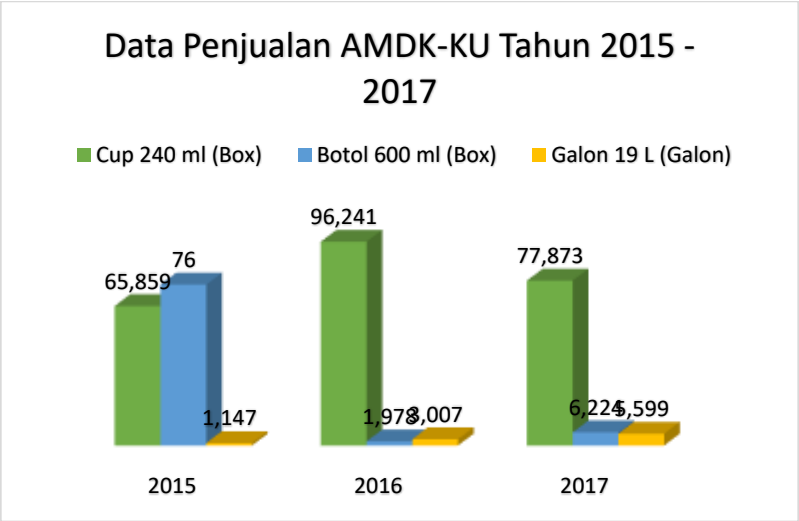

Sumber : Data PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo

Produksi Air-Ku sesuai dengan grafik diatas menunjukan bahwa lebih banyak produksi dalam kemasan cup 240 ml dikarenakan lebih banyak diminati oleh masyarakat. Dikarenakan kemasan cup lebih

digunakan untuk catering kardusan maupun snack dalam rapat. Produksi Air-Ku meningkat pada setiap tahunnya, dengan kata lain semakin meningkat tingkat pembelian dari masyarakat. Perkembangan dari Air-Ku ini dibantu dengan pengaruh kebijakan dari Bupati, walaupun hanya sebuah himbauan akan tetapi sekarang sudah berkembang dengan sangat baik.

> "Kendala itu kalo kami di pemasaran itu waktu jadi distributor tunggal, ketika vakum 3 (tiga) bulan tanpa ada permintaan itu kemudian jalan keluarnya dengan buat agen yang banyak. Kemudian bahan baku kita itu masih tergantung sama suplyer luar, botol sama kardus belum bisa bikin sendiri, ini mempengaruhi fluktuasi harga pasar, mau naikin harga jadi riskan karena prediksi rupiah naik atau tidak itu tidak bisa ditentukan."(Wawancara dengan Bapak Meirianto, selaku penanggung jawab Air-Ku di PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 pukul 9.30)

Adapun setiap pelaksanaan program pasti terdapat kendala. Dalam hal pemasaran kendalanya adalah pada waktu masih menjadi distributor tunggal sehingga masih sedikit yang mengkonsumsi Air-Ku sehingga permintaan konsumsi Air-Ku menyebabkan tidak adanya kegiatan selama 3 bulan. Kemudian PDAM Tirta Binangun Kulon Progo mendapatkan jalan keluar dengan membuka agen yang lebih banyak. Selain itu dalam hal produksi kendalanya adalah bahan baku untuk produksi Air-Ku seperti botol dan kardus masih bergantung dengan suplyer luar daerah. Hal ini mempengaruhi fluktuasi harga pasar dan kenaikan maupun penurunan rupiah tidak bisa diprediksi.

Gambar 10. Proses Produksi AMDK Air-KU

Sumber : Data PDAM Tirta Binangun Kulon Progo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, pelaksanaan program Air-Ku ini berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dikarenakan terdapat komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Selain itu menurut peneliti program ini sudah berhasil mewujudkan tujuan yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo.

Program Air-Ku ini mendapatkan fasilitas infrastruktur dari pemerintah daerah berupa pabrik tempat produksi. Selain itu

mendapatkan alat-alat untuk produksi AMDK Air-Ku. Pada pelaksanaannya PDAM Tirta Binangun terus berusaha untuk meningkatan produksi Air-Ku. Selain itu pada tahun ini pabrik produksi Air-Ku akan mendapatkan mesin produksi untuk kemasan cup/gelas dari Pemerintah. Hal ini disampaikan oleh narasumber, sebagai berikut

> "Untuk fasilitas dari pemerintah ini kita mendapatkan pabrik serta alat-alatnya dan tahun 2018 akan ada mesin produksi untuk kemasan cup/gelas" (Wawancara dengan Bapak Meirianto, selaku penanggung jawab Air-Ku di PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 pukul 9.45)

Sampai saat ini pemasaran Air-Ku masih berada di wilayah Kulon Progo saja. Akan lebih baik dan menguntungkan bagi daerah apabila mulai untuk dipasarkan ke luar daerah. Hal tersebut mungkin dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo.

5. Pendirian TOMIRA

Bermulai dari keresahan yang dirasakan masyarakat tentang berdirinya toko modern waralaba di Kulon Progo terutama yang berada di dekat pasar tradisional dan toko-toko kelontong. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melakukan kajian terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dan menghasilkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.Maksud dan tujuan yang tertuang pada pasal 2

untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usaha dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan UMKM dengan tujuan menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan baik bagi penjual maupun pembeli, meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal, menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memelihara wilayah yang memiliki nilai historis budaya, dan menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Pada pasal 14 C dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa toko modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dengan Pasar Tradisional. Apabila ada toko waralaba yang berjarak kurang dari 1.000 m dari pasar tradisional maka dikenakan sanksi yaitu berupa penutupan toko.

> "Waktu itu kalau tidak salah ada 18 toko yang melanggar dan saksinya sudah jelas tertera pada Peraturan Daerah. Kemudian dilayangkan surat pemberitahuan ke toko-toko tersebut kalau toko tersebut melanggar Peraturan Daerah. Kemudian Alfamart dan Indomart menghadap ke Pak Bupati untuk memohon dispensasi karena apabila toko langsung ditutup sewa masih berjalan" (Wawancara dengan Bapak Totok Hermawan, S.E., selaku penanggung jawab ToMiRa, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Pukul 13.20 WIB)

Setelah diterbitkannya peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan tradisional Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo menemukan ada 18 (delapan belas) toko modern waralaba yaitu Alfamart dan Indomart yang melanggar Pertaruran Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Kemudian pihak Alfamart dan Indomart menghadap ke Bupati Kulon Progo untuk meminta dispensasi dikarenakan kontrak perizinan yang masih panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah mencari solusi alternatif yang diharapkan saling menguntungkan, bersinergi, mampu mendukung dan memihak ekonomi kerakyatan dan bekerja sama dengan koperasi dan UMKM Kulon Progo untuk melaksanakan program Bela-Beli Kulon Progo.

> "Pak Bupati menjawab kalau anda minta dispensasi berarti ini bukan rembugan karena sudah jelas jika toko melanggar Peraturan Daerah. Kemudian Pak Bupati menawarkan kalau masih mau buka tokonya harus di kerjasamakan dengan koperasi, toko dibeli olrh koperasi dengan cara mengangsur dari omset penjualan toko tersebut" (Wawancara dengan Bapak Totok Hermawan, S.E., selaku penanggung jawab ToMiRa, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Pukul 13.30 WIB)

Solusi yang didapatkan setelah kajian yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan dibentuknya kerjasama atau kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan perusahaan toko modern. Toko Milik Rakyat (ToMiRa) merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Alfamart atau Indomart yang berjarak kurang

dari 1.000 m (seribu meter) dari Pasar Tradisional wajib untuk bekerjasama dengan Koperasi UMKM Kulon Progo. Alfamart dan Indomart bekerjasama dengan Koperasi UMKM Kulon Progo sebagai suplier dari toko tersebut. Produk lokal asli Kulon Progo diutamakan menjadi suplier dari toko tersebut. ToMiRa menyediakan space 20% dari total barang dagangan untuk produk-produk lokal Kulon Progo yang dikelola oleh Koperasi UMKM.

Tabel 11. Perbedaan ToMiRa dan Toko Waralaba

No	Aspek Kerjasama	Toko Waralaba Standar	ToMiRa
1	Status Kesetaraan	Indomart/Alfamart sebagai perusahaan prinsipal memberi hak kepada mitra lokal	Indomart/Alfamart hanya sebagai salah satu suplier
2	Independensi	Perjanjian sifatnya sepihak dari prinsipal Mitra lokal tergantung pada prinsipan	• Perjanjian dengan permufakatan kedua belah pihak • Kedudukan setara • Koperasi menjadi Roh dari ToMiRa
3	Manajemen Toko	Sepenuhnya kewenangan perusahaan prinsipal	• Menjadi kewenangan dari Koperasi (secara bertahap diserahkan kepada mitra lokal atau Koperasi sampai perjanjian selesai) • Koperasi bisa melakukan kerjasama pengelolaan manajemen toko dengan Indomart/Alfamart dan Koperasi tidak dibebani

			manajemen fee • Ada bantuan dan perkuatan yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha besar kepada mitra pelaku UKM termasuk Koperasi • Ada transfer pengetahuan, manajemen dan IT
4	Royalti Waralaba	Ada	Tidak ada
5	Monopoli Rantai Pasokan	Perusahaan Prinsipal sebagai pemasok tunggal.	Pemasok terdiri dari berbagai suplier dan berbagai macam produk lokal UMKM
6	Administrasi Keuangan	Perusahaan prinsipal sebagai admin tunggal.	Dikelola bersama diatur mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dalam perjanjian
7	Pasokan Sumberdaya Manusia	Dari perusahaan prinsipal dan tidak harus warga asli Kulon Progo.	Dari mitra lokal dan wajib warga asli Kulon Progo.

Sumber: Dokumen ToMiRa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa perbedaan ToMiRa dengan Toko Waralaba biasa. Model bisnis ToMiRa sudah berbeda dengan model perusahaan. ToMiRa sudah tidak lagi dalam pengelolaan pabrik tetapi sudah ada suplier lain. Pasokan barang dari pabrik masih ada akan tetapi ditambah dengan pasokan penjualan produk-produk lokal UMKM Kabupaten Kulon Progo. Pemasok dari pabrik dan pemasok dari produk-produk lokal pun memliki status

yang setara sehingga diharapkan terbentuknya produk-produk lokal yang bermutu dan layak jual di pangsa pasar moder yang nantinya akan meningkatkan kekuatan ekonomi lokal dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Bagan 5. Alur Kerjasama ToMiRa dengan Alfamart

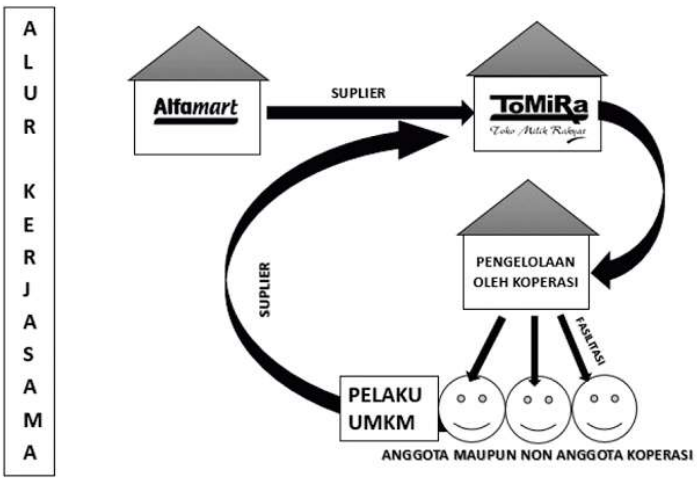

Sumber: Dokumen ToMiRa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo

Sistem kerjasama ToMiRa dengan Alfamart/Indomart menggunakan sistem kerjasama kemitraan dengan pola perdagangan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada Pasal 26 Huruf d. Bentuk kerjasamanya yaitu sesuai dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 30 yaitu dilakukan dengan bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha dan penerimaan pasokan UMKM dari usaha besar.

Dalam kasus ToMiRa dengan Alfamart atau Indomart pemasaran dilakukan dengan proses pembelian, seperti yang

disampaikan oleh Bapak Totok diatas bahwa pembelian dilakukan secara angsur dari keuntungan ToMiRa. Sedangkan bentuk kerjasama untuk penyediaan lokasi usaha sudah termasuk dengan pembelian ToMiRa dikarenakan lokasi toko yang akan diambil alih oleh ToMiRa adalah toko yang sudah dibangun di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kemudian bentuk kerjasama untuk penerimaan pasokan UMKM dari usaha besar yaitu dengan pemasokan produk lokal UMKM melalui Koperasi, PDAM, UMKM, Gapoktan, Alfamart dan Indomart.

Pendirian ToMiRa sudah mulai berjalan sejak akhir 2014 sampai saat ini. Berikut adalah data perkembangan ToMiRa yang diresmikan pada tahap I (pertama) sampai tahap VI (enam) :

Tabel 12. Tahap Pendirian ToMiRa

No	Tahap Pendirian	ToMiRa	Koperasi yang bertanggung jawab
1	Tahap I Diresmikan 23 - 12 - 2014	1) ToMiRa Jombokan	KSU Binangun Prima
		2) ToMiRa Bendungan	KSU BMT Giri Makmur
		3) ToMiRa Dekso	KOP Aneka (BUMD Aneka Usaha Kabupaten Kulon Progo
2	Tahap II Diresmikan 1 – 12 – 2015	1) ToMiRa Temon	KSU Trijata
		2) ToMiRa Lendah	KSU Legowo
		3) ToMiRa Proliman	KPN Sumber Rejeki
		4) ToMiRa Ki Josuta	Mitra Prima Daya

No	Tahap Pendirian	ToMiRa	Koperasi yang bertanggung jawab
3	Tahap III Diresmikan 23 – 8 – 2016	1) ToMiRa KUD Sentolo	KUD Gangsar Sentolo
		2) ToMiRa KUD Temon	KUD Harapan Temon
4	Tahap IV Diresmikan 12 – 6 - 2017	1) ToMiRa Sentolo	KSU Mukti Bareng
5	Tahap V Diresmikan 22 – 7 – 2017	1) ToMiRa Brosot	Kopwan Dahlia dengan CV Dzaki Persada Global
		2) ToMiRa Samigaluh	KSU BMT Al-Azka dengan CV Gemilang Jaya Abadi
		3) ToMiRa Nanggulan	KSU SAE dengan CV Berkah Mulia
6	Tahap VI Diresmikan 21 – 2 – 2018	1) ToMiRa Diponegoro	Koperasi Bina Ria
		2) ToMiRa Anugrah	Koperasi Sempulur
		3) ToMiRa Khudori	Koperasi Benih Kasih

Pada tahap pertama dan kedua pendirian ToMiRa dilakukan dengan model *Take Over* dimana Alfamart diambil alih sepenuhnya oleh Koperasi dengan angsuran yang dibayarkan kepada Koperasi selama sisa masa kontrak. Sedangkan untuk Tahap ketiga sampai keenam dilakukan dengan model Modal Penyertaan berdasarkan dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor

11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi. Mengacu pada Bagian Kedua Pasal 4 poin 1 (satu) dalam Peraturan Menteri, sumber modal penyertaan ini bersumber dari Pemerintah dan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum.

> "Karena Indomart yang diajukan berjarak lebih dari 1.000 meter dan memang Indomart belum punya outlet dan KUD punya tanah, maka KUD menyiapkan tanah dan bangunan dari Indomart. Jadi penyertaan modal dari Indomart ke Koperasi dalam bentuk investasi. Koperasi menerima modal dari pihak luar yaitu Indomart dan dalam hal ToMiRa ini, teknis Dinas Koperasi adalah untuk memperkuat kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan usaha" (Wawancara dengan Bapak Totok Hermawan, S.E., selaku penanggung jawab ToMiRa, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Pukul 13.40 WIB)

Dalam kasus ToMiRa sumber modal penyertaan berasal dari Indomart dan Pemerintah. Indomart menyertakan modal kepada Koperasi yang bekerjasama dengan kata lain Koperasi menerima modal penyertaan dari pihak luar yaitu dari Indomart. Sedangkan sumber modal dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo yaitu fasilitas dalam hal memberdayakan Koperasi untuk mampu berusaha secara mandiri. Perjanjian dari Indomart atau Alfamart dalam modal penyertaan ini berlangsung selama 5 tahun. Apabila sewa Indomart sudah habis maka setelah selesai masa kontrak ToMiRa akan menjadi milik Koperasi sepenuhnya.

Demi terlaksananya kelancaran dalam implementasi program ToMiRa, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan landasan hukum terkait program ini berupa peraturan daerah. Pada tahun 2016 telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selain itu Pemerintah Daerah akan terus mengembangkan MoU dengan Indomart atau Alfamart sehingga nantinya semua Toko Modern berjejaring di Kulon Progo menjadi ToMiRa.

> "Sistem pengelolaan yang dipakai, manajemen operasional ToMiRa itu di KPN Sumber Rejeki selama ini masih dipegang Alfamart. Setiap satu bulan sekali pasti ada laporan dari Alfamart. Kalo untuk pengelolaan SDM seharusnya memang 50:50 tapi dari Koperasi sendiri masih terkendala sumberdaya manusia dan keterbatasan transfer knowledge. Jadi untuk manajemen sumberdaya manusia masih banyak dari Alfamart" (Wawancara dengan Bp. Johan, selaku Penanggungjawab ToMiRa dari KPN Sumber Rejeki. Pada hari Kamis, 26 Maret 2018 pukul 13.30 WIB)

Pelaksanaan dari Koperasi pemegang ToMiRa ternyata masih memiliki beberapa kendala terutama pada sumberdaya manusia dan kurangnya transfer knowledge dari Koperasi itu sendiri. Sehingga pada pelaksanaannya belum sepenuhnya di ambil alih oleh Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo.

Pada pelaksanaannya barang-barang produk di ToMiRa merupakan kombinasi antara supplyer Alfamart dengan Koperasi penanggungjawab. Koperasi dan UMKM Kulon Progo men-supply dengan produk lokal Kulon Progo. Produk UMKM ini dikoordinasikan dengan paguyuban Koperasi ToMiRa Kulon Progo. Berikut beberapa produk lokal Kulon Progo yang diperjual belikan di ToMiRa :

Tabel 13. Data Produk Lokal UMKM Kulon Progo di ToMiRa

No	Nama Produk	No	Nama Produk
1	Coklat Pegagan	8	Kopi Suroloyo
2	Wingko Ijo	9	Teh Suroloyo
3	Telur Asin Rasa Soto	10	Jamur Tiram
4	Sari Nila Gula Kristral Rasa Jahe	11	Peyek Menoreh
5	Abon Cabe	12	Keripik Belut Bayu Aji
6	Kopi Moka Menoreh	13	Sambal Kering Belut Pedas
7	Java Menoreh Kopi Jahe Gula Aren	14	Tape Ketan Bu Nur

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo

Pada pelaksanaannya Produk Lokal UMKM Kulon Progo yang berada diperjual belikan di ToMiRa ini merupakan barang yang sudah mendapatkan ijin P. IRT dari Dinas Kesehatan Kulon Progo. Selain itu para pelaku UMKM tersebut sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi terhadap produk yang akan dijual di ToMiRa.

Hal tersebut membuktikan bahwa adanya pembinaan dari Dinas Koperasi UMKM Kulon Progo terhadap pelaku UMKM yang akan menjual produknya di ToMiRa. Pelaksanaan tersebut dibuktikan dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu pelaku UMKM yang menyuplai produknya ke ToMiRa, sebagai berikut :

> "Untuk pengembangan usaha para pelaku UMKM sebelumnya didata dulu oleh Dinas Koperasi UMKM kemudian ada pembinaan untuk sosialisasi pembuatan P.IRT serta pembinaan pengemasan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk lokal UMKM Kulon Progo. Kalau untuk keuntungan atau kerugian penjualan produk UMKM tersebut kita mendapatkan keuntungan dari penjualan produk kita di ToMiRa. Jadi penjualan di ToMiRa itu membantu para pelaku UMKM karena pasti untung penjualannya" (Wawancara dengan Ibu Wiyati,selaku salah satu pelaku UMKM penjual Tape Ketan Bu Nur, dilakukan pada hari Ahad, tanggal 1 April 2018 pada pukul 10.35 WIB)

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilaksanakan terhadap bagaimana keuntungan yang didapatkan pelaku UMKM, apakah terjadi keuntungan atau kerugian. Seperti yang telah dituliskan diatas bahwa penjualan produk UMKM sebesar 20% di ToMiRa. Setiap pelaku UMKM yang menyuplai produknya pasti mendapatkan keuntungan dalam penjualannya. Kemudian untuk KPN Sumber Rejeki yang diwawancarai oleh penulis memberika data bahwa pada tahun 2016 setelah 1 tahun berjalan, KPN Sumber Rejeki ini mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 58.413.567,-.

Menurut observasi yang dilakukan penulis pada hari Selasa, 20 Februari 2018 pada pukul 14.30 di ToMiRa Proliman menunjukkan bahwa di ToMiRa tersebut seluruh produk lokal UMKM Kulon Progo penjualannya disatukan dalam satu rak. Kemudian seragam yang digunakan pegawai pun saat ini sudah bertuliskan ToMiRa Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 11. Produk Lokal UMKM ToMiRa

Sumber : Data Observasi Penelitian pada hari Selasa, 20 Februari 2018

Berdasarkan penelitian pelaksanaan yang sudah dijelaskan penulis diatas. Pelaksanaan pendirian ToMiRa ini berjalan dengan baik dan lancar serta sudah sesuai dengan standar dan tujuannya. Hal ini didasarkan pada penelitian penulis bahwa dalam pelaksanaannya para implementor sudah melaksanakan sesuai dengan standar yang ada dengan mewujudkan tujuan dari program tersebut. Peningkatan pengambil alihan Alfamart/Indomart menjadi ToMiRa merupakan suatu hal yang bagus dikarenakan semakin banyak koperasi yang turut serta dalam pelaksanaan program. Dengan begitu program ini dapat meningkatkan kesejahteraan koperasi serta kesejahteraan pelaku UMKM Kulon Progo.

Kendala yang masih belum terjawab dalam pelaksanaan ToMiRa ini adalah kurangnya sumberdaya yang dimiliki koperasi untuk benar-benar melepaskan diri dari ToMiRa. Manajemen sumberdaya manusia yang ada di ToMiRa cenderung lebih banyak dikelola pihak Alfamart/Indomart. Hal ini menjadi terlihat seperti ToMiRa hanya merupakan pemasok produk UMKM.

B. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo

1. Standar dan Tujuan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo

Kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo merupakan konsep yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan program-program terkait Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Secara keseluruhan

Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini merupakan implementasi dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 – 2016. Selain itu program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo secara keseluruhan memiliki tujuan yang sama yaitu, menyejahterakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan penguatan ekonomi lokal Kulon Progo.

Dalam hal pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo ini tidak hanya mengacu pada Gerakan Bela-Beli Kulon Progo saja akan tetapi juga mengikuti peraturan dan tujuan yang lain.

Program Batik Gebleg Renteng dalam pelaksanaannya berjalan berdasarkan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang merupakan perwujudan dari Visi Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Periode 2011 – 2016. Program Batik Gebleg Renteng memiliki tujuan dalam hal industri batik yaitu mengembangkan potensi dan industri batik Kulon Progo dan meningkatkan pormosi, meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan adanya Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 025/2171, 2 Juli 2012 tentang Penggunaan Pakaian Batik Motif Gebleg Renteng. Adapun sasaran dari pada Program Batik Gebleg Renteng adalah masyarakat pengrajin Batik serta seluruh masyarakat Kulon Progo.

Program RASDA (Beras Daerah) ini dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Gerakan Bela-Beli Kulon Progo dengan mewujudkan slogan *"Madhep Mantep Mangan Pangane Dhewe".* Tujuan RASDA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani produsen pangan. Selain itu RASDA merupakan perwujudan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan bahwa dalam mewujudkan keterjangkauan pangan salah satunya adalah dengan melaksanakan kebijakan di bidang bantuan pangan. Adapun sasaran dari pada program RASDA adalah petani, masyarakat penerima RASDA, serta seluruh masyarakat Kulon Progo.

Program Beras PNS berjalan berdasarkan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo dengan mewujudkan slogan *"Madhep Mantep Mangan Pangane Dhewe".* Program Beras PNS merupakan kebijakan dari Bupati Kulon Progo melalu Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 500/5231 Tahun 2015 tentang Program Beras PNS. Tujuan dari Beras PNS ini yaitu untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani Kulon Progo. Adapun sasaran dari program Beras PNS ini adalah petani Kulon Progo serta PNS Kabupaten Kulon Progo.

Program Air-Ku dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada Gerakan Bela-Beli Kulon Progo dengan mewujudkan slogan *"Madhep Mantep Ngombe Banyune Dhewe"*. Program Air-Ku

merupakan perwujudan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang PDAM Tirta Binangun Kulon Progo. Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa tujuan PDAM adalah memenuhi air bersih dan/atau air minum guna meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan mendukung Pendapatan Asli Daerah. Selain itu dijelaskan juga pada Pasal 6 huruf B tentang tugas pokok PDAM Tirta Binangun adalah menghimpun dana guna pengembangan dan menjaga kelangsungan hidup PDAM serta pada Pasal 7 huruf C bahwa PDAM Tirta Binangun mempunya fungsi mendukung Pendapatan Asli Daerah. Adapun sasaran dari program Air-Ku adalah seluruh masyarakat Kulon Progo.

Program ToMiRa dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada Gerakan Bela-Beli Kulon Progo serta Pertaruran Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tujuan dari Peraturan Daerah tersebut tertuang pada Pasal 2 yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan UMKM. Adapun sasaran dari pada program ToMiRa ini antara lain adalah koperasi-koperasi di Kulon Progo, pelaksana UMKM Kulon Progo, serta seluruh masyarakat Kulon Progo.

Terkait dengan faktor standar dan tujuan implementasi program, seluruh pelaksana program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat telah memahami akan setiap standar dan tujuan dari pada setiap program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Sehingga pelaksana dapat menjalankan program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo sesuai dengan standar dan tujuannya.

Pada pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo pelaksana sudah melaksanakan program sesuai dengan standar dari setiap program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Tujuan dari program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo cenderung sudah tercapai dengan baik.

2. Sumberdaya Gerakan Bela-Beli Kulon Progo

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa sumberdaya yang mempengaruhi pelaksanaan program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Sumberdaya tersebut adalah sumberdaya manusia, sumberdaya material, sumberdaya ekonomi, serta sumberdaya alam.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo terbagi sesuai pada setiap program. Sumberdaya manusia dari program Batik Gebleg Renteng

yaitu Bagian Perindustrian Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo beserta 17 (tujuh belas) pengrajin batik.

Daftar Pengrajin Batik Kulon Progo

No	Pengrajin Batik	No	Pengrajin Batik
1	Batik Estin	10	Batik MDR
2	Yoga Batik	11	Batik Winoto Sastro
3	Batik Darminto	12	Batik Rania
4	Aricha Batik	13	Anugerah Batik
5	Batik Karina	14	Batik Pesisir Selatan
6	Batik Rojimin	15	Sembung Batik
7	Batik Farras	16	Widodo Indigo
8	Stin Batik	17	Tom Batik
9	Saraswati Batik		

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Sumberdaya manusia dari program RASDA dan Beras PNS yaitu Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang bergerak sebagai Tim Pemantau Beras PNS dan Beras Daerah (RASDA), sedangkan pelaksananya adalah 8 GAPOKTAN yang berada di Kulon Progo.

Data GAPOKTAN Suplyer RASDA dan Beras PNS

No	Nama GAPOKTAN	No	Nama Gapoktan
1	GAPOKTAN Panca Manunggal	5	GAPOKTAN Sidomaju
2	GAPOKTAN Ngestiharjo	6	GAPOKTAN Sari Mulyo
3	GAPOKTAN Makmur Sejahter	7	GAPOKTAN Sumber Makmur
4	GAPOKTAN Among Tani	8	GAPOKTAN Guyub Rukun

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo

Sumberdaya manusia dari program Air-Ku yaitu PDAM Tirta Binangun Kulon Progo, sedangkan pelaksananya yaitu 10 pekerja pabrik produksi Air-Ku serta beberapa agen Air-Ku di Kulon Progo. Sumberdaya manusia dari program ToMiRa yaitu Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kulon Progo, sedangkan pelaksananya adalah 16 Koperasi Kulon Progo yang sudah mengambil alih Alfamart atau Indomart.

Daftar Koperasi dan ToMiRa

No	ToMiRa	Koperasi yang bertanggung jawab
1	1) ToMiRa Jombokan	KSU Binangun Prima
	2) ToMiRa Bendungan	KSU BMT Giri Makmur
	3) ToMiRa Dekso	KOP Aneka (BUMD Aneka Usaha Kabupaten Kulon Progo)

2	1) ToMiRa Temon	KSU Trijata
	2) ToMiRa Lendah	KSU Legowo
	3) ToMiRa Proliman	KPN Sumber Rejeki
	4) ToMiRa Ki Josuta	Mitra Prima Daya
3	1) ToMiRa KUD Sentolo	KUD Gangsar Sentolo
	2) ToMiRa KUD Temon	KUD Harapan Temon
4	1) ToMiRa Sentolo	KSU Mukti Bareng
5	1) ToMiRa Brosot	Kopwan Dahlia dengan CV Dzaki Persada Global
	2) ToMiRa Samigaluh	KSU BMT Al-Azka dengan CV Gemilang Jaya Abadi
	3) ToMiRa Nanggulan	KSU SAE dengan CV Berkah Mulia
6	1) ToMiRa Diponegoro	Koperasi Bina Ria
	2) ToMiRa Anugrah	Koperasi Sempulur
	3) ToMiRa Khudori	Koperasi Benih Kasih

> "Jika kita ingin mengambil alih seluruh Alfamart beserta manajemennya dari kita juga terkendala sumberdaya manusianya. Karena pekerja dari Koperasi hanya 3 orang saja jadi kita kesusahan kalau kesana kemari" (Wawancara dengan Bp. Johan, selaku penanggung jawab ToMiRa di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sumber Rejeki. Pada hari Kamis, 29 Maret 2018 pukul 13.30 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian ini maka bisa disimpulkan bahwa sumberdaya manusia dalam pelaksanaan beberapa program-program tersebut sudah tercukupi. Akan tetapi pada program ToMiRa terdapat

kekurangan sumberdaya manusia pada bagian Koperasi penanggungjawab ToMiRa.

b. Sumberdaya Material

Sumberdaya material yang dimaksud pada penelitian ini adalah infrastrukur dalam pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Infrastruktur yang didapatkan oleh para pelaksana merupakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

Dalam pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini terdapat beberapa program yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah. Pada program RASDA dan Beras PNS, GAPOKTAN sebagai pelaksana mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah berupa alat-alat yang digunakan untuk produksi beras dari mulai alat untuk pengolahan sampai pasca panen. Fasilitas tersebut berupa traktor, dryer, komben, serta mesin penggiling beras. Hal ini disampaikan oleh Bp. Margiono Ketua Koordinator GAPOKTAN Beras PNS,

> "8 Gapoktan sudah dapat fasilitas, revitalisasi, traktor. Dari mulai pengolahan sampai pengemasan sudah dapat fasilitas. Komben dan mesing penggilingan sudah didapatkan dari Pemerintah" (Wawancara dengan Bp Margiono, selaku Koordinator GAPOKTAN Beras PNS, pada hari Senin 2 April 2018 pukul 11.35 WIB)

Daftar Dukungan Fasilitasi Pemerintah

No	Nama GAPOKTAN	Dukungan/Fasilitasi		
		2014	2015	2016
1	Panca Manunggal	Rev RMU Rp 195.000.000 Dryer Rp 180.000.000		
2	Makmur Sejahtera	Rev RMU Rp 195.000.000		
3	Among Tani		Rev RMU Rp 195.000.000	
4	Sido Maju		Rev RMU Rp 195.000.000	Bangunan Dryer Rp187.000.000
5	Sari Mulyo		Rev RMU Rp 195.000.000	
6	Ngesti Harjo		Rev RMU Rp 195.000.000	

Sumber : Dokumen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

"Pada tahun 2018 ini akan ditangkan mesin produksi untuk kemasan cup/gelas. Selain itu kita mendapatkan infrastruktur pabrik di daerah Clereng serta alat-alat produksi yang ada di pabrik tersebut." (Wawancara dengan Bapak Meirianto, selaku penanggung jawab Air-Ku di PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 pukul 9.30)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pada program Air-Ku telah diberikan fasilitas untuk pengolahan air minum dalam kemasan pada pabrik Air-Ku. Akan tetapi untuk sumberdaya material seperti kemasan air dan karton kardus untuk kemasan cup/gelas masih mendatangkan supplyer dari luar. Bp. Meirianto selaku penanggung jawab pelaksanaan Air-Ku menyampaikan bahwa pada tahun 2018 akan didatangkan mesin produksi untuk cup/gelas sehingga dapat memproduksi kemasan cup/gelas sendiri tanpa harus menggunakan supplyer dari luar daerah.

Berdasarkan penelitian analisis pada faktor sumberdaya material ini bahwa belum semua program mendapatkan pemenuhan sumberdaya material dari Pemerintah. Akan tetapi pemenuhan alat dan infratruktur sedang diusahakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo pada perencanaan anggaran tahun 2017.

c. Sumberdaya Ekonomi

Sumberdaya ekonomi merupakan salah satu sumberdaya yang penting untuk pelaksanaan implementasi kebijakan. Apabila kurangnya dana dalam pelaksanaan dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan.

Gerakan Bela-Beli Kulon Progo merupakan konsep dalam meningkatkan kekuatan ekonomi lokal demi meningkatkan kemandirian Kulon Progo. Pada pelaksanaannya program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini diharapkan untuk tidak bergantung dengan APBD. Sebaliknya, diharapkan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini justru akan meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo. Maksud dari tidak bergantung dengan APBD adalah nantinya program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini mampu menghasilkan karya-karya dengan mandiri dan menguntungkan masyarakat serta Kulon Progo secara keseluruhan.

> "Kita ada dapat dana untuk biaya modal panen sama pengolahan itu dari Pemerintah Rp 375.000.000,00. Bantuan ini sangat membantu untuk proses produksi beras di GAPOKTAN. Biasanya kalau modal tinggi hasilnya tinggi juga, kalau tidak yaa hasilnya juga mungkin kurang bisa memenuhi target" (Wawancara dengan Bp. Nur Rohim selaku Ketua GAPOKTAN Panca Manunggal. Pada hari Selasa, 20 Februari 2018 pukul 13.45 WIB)

Beberapa pelaksanaan program dari Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini mendapatkan bantuan secara finansial atau dana untuk beberapa pelaksana. Setiap GAPOKTAN pelaksana RASDA dan Beras PNS mendapatkan modal dari

Pemerintah Daerah sejumlah Rp 375.000.000,00 untuk pelaksanaan produksi beras.

Peneliti menganalisis bahwa masih ada salah satu program yang bergantung terhadap dana dari Pemerintah walaupun tidak bergantung sepenuhnya. Hal ini menandakan bahwa beberapa program masih bergantung terhadap APBD Kulon Progo dan belum terwujud sepenuhnya untuk tidak menggunakan dana APBD Kulon Progo.

d. Sumberdaya Alam

Pada pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini ada beberapa program yang menggunakan sumberdaya alam. Sumberdaya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumberdaya alam ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

> "Kita itu spesialis batik pewarna alam. Jadi untuk pewarna alamnya kita memakai sumberdaya alam. Sumberdaya alam ini dari daun indigo yang menjadi warna biru, daun mangga yang jadi warna kuning, daun putri malu yang jadi kuning kehijauan serta kayu mahoni yang menjadi warna coklat." (Wawancara dengan Bp. Widodo Selaku pemilik Tom Batik. Hari Ahad tanggal 18 Februari 2018 pada pukul 11.30 WIB)

Program Batik Gebleg Renteng yang beberapa pengrajinnya yaitu Tom Batik milik Bapak Widodo menggunakan tanaman sebagai salah satu pewarna alami

seperti daun indigo yang menghasilkan warna biru, daun mangga yang menghasilkan warna kuning, daun putri malu yang menghasilkan warna kuning kehijauan, serta kayu mahoni yang menghasilkan warna coklat.

"Kalau untuk produksi beras sudah tentu yaa sumberdaya alam kita itu dari sawah yang berada di Kulon Progo, karena persawahan di Kulon Progo ini masih luas. Kalau bukan musim tanam padi biasanya dipakai untuk jadi ladang" ,-" (Wawancara dengan Bp. Margiono dari GAPOKTAN Panca Manunggal, selaku Koordinator GAPOKTAN Beras PNS. Hari Senin, 02 April 2018 pada pukul 11.30 WIB

Program RASDA dan Beras PNS merupakan program yang menggunakan sumberdaya alam yaitu sawah yang berada di wilayah Kulon Progo. Selain itu menurut RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 tercatat bahwa total luas sawah di Kulon Progo adalah 9.713,57 hektar.

"Air minum yang dipakai untuk AMDK Air-Ku ini berasal dari sumber mata air di Kulon Progo. Sejauh ini baru satu mata air di Kulon Progo yang bisa kita gunakan untuk produksi Air-Ku, yaitu sumber mata air di Clereng, Pengasih." (Wawancara dengan Bapak Meirianto, selaku penanggung jawab Air-Ku di PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 pukul 9.30)

Program Air-Ku menggunakan sumberdaya alam berupa sumber mata air dari Clereng, Pengasih, Kulon Progo. Sumber mata air tersebut digunakan untuk membuat

air minum kemasan Air-Ku yang dipasarkan di seluruh wilayah Kulon Progo.

Berdasarkan pada hasil penelitian ini bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah mengelola sumberdaya alam yang cukup melimpah dengan baik untuk mendukung kehidupan serta kesejahteraan masyarakatnya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana/Implementor

Karakteristik agen pelaksana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mencakup norma-norma, struktur birokrasi, serta pola-pola hubungan yang terjadi di birokrasi. Hal tersebut akan mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan. Pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini pelaksanaannya melibatkan beberapa agen pelaksana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo serta beberapa kelompok masyarakat yang terlibat pada setiap program. Agen pelaksana yang terlibat telah disebutkan oleh penulis dalam faktor sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan ini.

Dinas Perdagangan Kulon Progo merupakan instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Batik Gebleg Renteng. Petugas pelaksananya adalah Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Bidang Perindustrian

membawahi 18 pengrajin batik Kulon Progo yang tergabung dalam asosiasi batik Kulon Progo. Program yang dilaksanakan Bidang Perindustrian adalah penumbuhan dan pengembangan usaha industri berbasis sandang, kulit, dan kerajinan.

> "Tugas pokok fungsi kita itu menumbuhkan, mengembangkan dan pendampingan dan monitoring kepada pelaku-pelaku industri. Tetapi memang pendampingan kita setelah tahun 2014 belum ada lagi" (Wawancara dengan Bp. Totok Sundoro, ST. Selaku KaSie Ekspor Impor Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 pada pukul 10.00 WIB

Dalam pelaksanaan program tersebut Bidang Perindustrian memiliki tugas dan fungsi untuk monitoring dan pendampingan pengrajin batik. Dalam pelaksanaannya menurut wawancara dari narasumber menyampaikan bahwa kurangnya pendampingan dari Pemerintah akan tetapi selalu terjadi peningkatan produksi dan pemasarannya setiap tahun. Hal tersebut terbukti dengan data yang berada pada Dinas Perdagangan terkait peningkatan realisasi Batik Gebleg Renteng hanya sampai tahun 2014. Hal tersebut membuktikan belum adanya pencatatan dan monitoring kembali yang dilakukan Pemerintah.

Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Tanaman dan Pangan merupakan instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program RASDA dan Beras PNS. Petugas pelaksananya adalah GAPOKTAN Kulon Progo dan bekerjasama dengan Bulog DIY untuk pendistribusian program RASDA. Dalam pelaksanaan

program RASDA dan Beras PNS ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa mewujudkan keterjangkauan pangan salah satunya dengan melaksanakan kebijakan di bantuan pangan. Tugas pokok dari Dinas Pertanian dan Pangan adalah melaksanakan sosialisasi, monitoring serta pendampingan kepada GAPOKTAN selaku pelaksana.

Skema Kerja Rasda

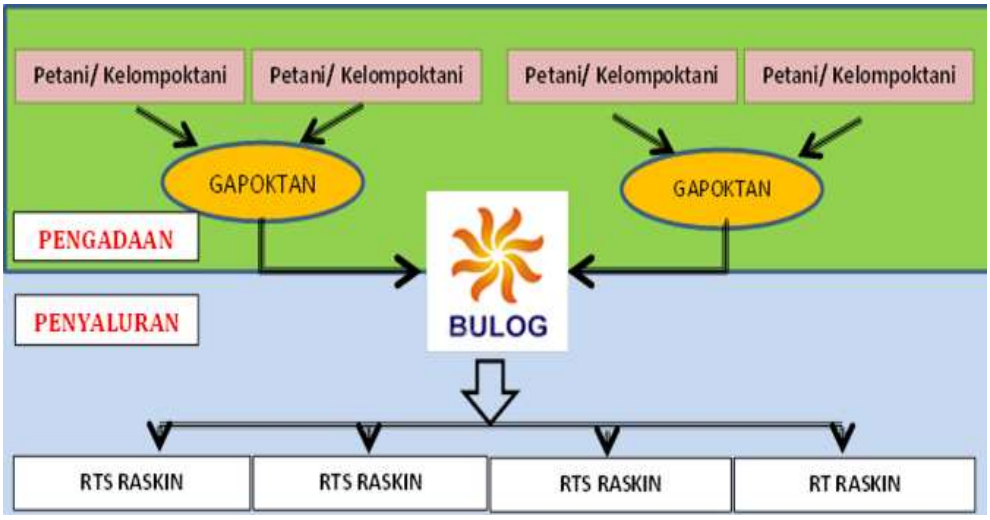

Sumber : Data Dokumen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan pada skema kerja Beras Daerah diatas GAPOKTAN menyalurkan hasil panen yang sudah berupa beras kepada Bulog. Bulog menyalurkan kepada RTS RASKIN di Kulon Progo. GAPOKTAN melaporkan beras hasil panen yang disetorkan kepada Bulog setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Pertanian dan Perdagangan. Dalam pelaksanaannya ketiga implementor ini sudah melaksanakan sesuai dengan urutan skema diatas dan berjalan dengan

lancar. Para implementor telah melaksankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga terjadi keselarasan antar para implementor Beras Daerah ini.

Bagan 6. Jaringan Antar Stakeholder Beras PNS

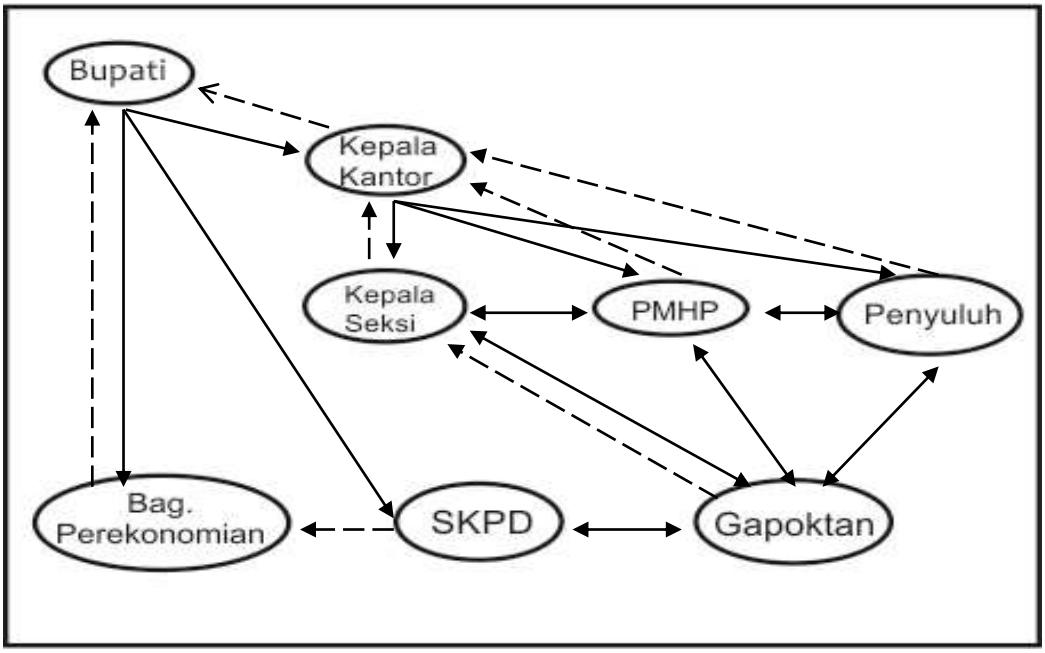

: Komando **: Laporan** **: Koordinasi**

Sumber : Tim Pemantau dan Pengawas Beras PNS

Berdasarkan pada bagan skema stakeholder Beras PNS diatas yaitu Bupati memberikan komando terhadap Kepala Kantor Dinas Pertanian dan Pangan dalam pelaksanaan program Beras PNS. Komando juga diberikan kepada SKPD Kabupaten Kulon Progo untuk pembelian Beras PNS yaitu beras “SEHAT” asli Kulon Progo. Kemudian Bupati memberikan komando kepada Bag. Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai Tim Pemantau Beras Daerah dan Beras

PNS. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan memberikan komando untuk pelaksanaan Beras PNS kepada Kepala Seksi, PMHP, dan Penyuluh. Kemudian Kepala Seksi, PMHP, Penyuluh dan GAPOKTAN saling berkoordinasi untuk pelaksanaan Beras PNS.

GAPOKTAN berkoordinasi langsung dengan SKPD untuk pembelian Beras PNS. GAPOKTAN melaporkan hasil pembelian kepada Kepala Seksi Tanaman dan Pangan. Kemudian SKPD memberikan laporan hasil pembelian Beras PNS setiap SKPD tersebut kepada Bag. Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo dan Tim Pemantau dan Pengawas Beras PNS melaporkan hasil pembelian kepada Bupati. Sedangkan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

Menurut hasil wawancara dari Bp. Margiono selaku koordinator GAPOKTAN Beras PNS, narasumber menyampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik sehingga tercipta keselarasan dalam pelaksanaan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan produksi dan pemasaran beras asli Kulon Progo setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa karakteristik kedua agen pelaksana dalam program ini paham dengan baik akan tugas dan fungsinya.

PDAM Tirta Binangun Kulon Progo merupakan instansi yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap program Air-Ku. PDAM tirta

Binangun merupakan pelaksana program Air-Ku bersama dengan 10 pekerja di pabrik, serta agen-agen Air-Ku di Kulon Progo. Dalam pelaksanaannya PDAM Tirta Binangun memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu, bertugas untuk emnghimpun dana guna pengembangan dan menjaga kelangsungan hidup PDAM serta mempunyai fungsi untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya PDAM Tirta Binangun sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan dan kemajuan dalam program Air-Ku.

Alur Kerjasama ToMiRa dengan Alfamart

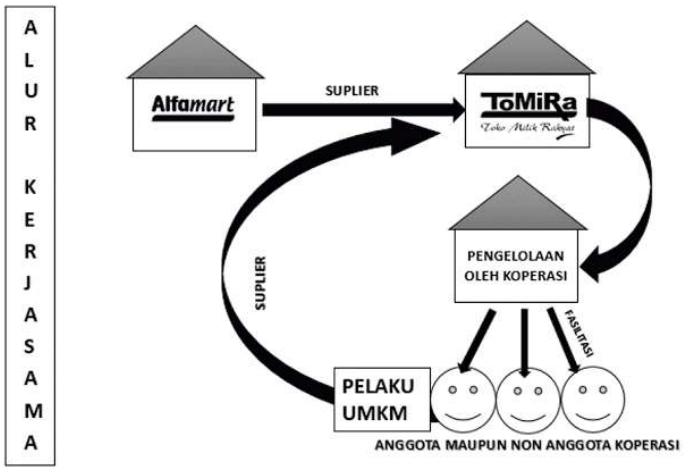

Sumber: Dokumen Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo

Dalam hal pelaksanaan ToMiRa ini Dinas Koperasi UMKM Kulon Progo merupakan penghubung antara Alfamart/Indomart

dengan Koperasi di Kulon Progo. Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan instansi yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap program ToMiRa. Pelaksana dari program ini adalah 16 Koperasi yang terdaftar sebagai pengambil alih Alfamart/Indomart. Tugas dan fungsi Dinas Koperasi ini adalah monitoring, memfasilitasi, dan pendampingan pelaksanaan pengambil alihan ToMiRa oleh Koperasi Kulon Progo.

Dalam pengelolaannya Koperasi bekerjasama dengan Alfamart/Indomart. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti membuktikan bahwa seluruh agen pelaksana dalam pelaksanaan program ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Dinas Koperasi UMKM memfasilitasi awal mula kerja sama antara Alfamart/Indomart dengan pihak Koperasi. Terbukti dengan adanya peningkatan pendirian ToMiRa setiap tahunnya yang menandakan bahwa adanya konsistensi dari para agen pelaksana sehingga membuat Koperasi yang lain ikut bergabung dalam program ini.

Berdasarkan penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo seluruh implementor sudah memahami tugas dan fungsinya masih masing sehingga dalam pelaksanaannya terjadi keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan program-program tersebut.

4. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Implementasi kebijakan menjadi efektif apabila antara pembuat keputusan serta pelaksana kebijakan memahami apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Setiap keputusan kebijakan dan peraturan kebijakan akan dilaksanakan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang baik diantara para pembuat keputusan serta pelaksana.

Sehubungan dengan implementasi program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang merupakan kebijakan yang bersifat *top down,* maka diperlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara agen-agen pelaksana. Pada setiap program-program dari Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini para agen pelaksana sudah mendapatkan sosialisasi dari instansi terkait yang bertanggungjawab. Sosialisasi terhadap standar, tujuan, sasaran serta pedoman-pedoman pelaksanaan dari setiap program.

> "Kita untuk Gapoktan RASDA itu ada setiap 3 bulan sekali monitoring dari Dinas. Kalau Beras PNS itu kita 1 bulan sekali ada laporan ke Dinas. Setiap ada standarisasi beras atau tentang peraturan baru pasti kita ada sosialisasi dari Dinas. Koordinasinya itu selalu berjalan dengan baik"(Wawancara dengan Bp. Margiono dari GAPOKTAN Panca Manunggal, selaku Koordinator GAPOKTAN Beras PNS. Hari Senin, 02 April 2018 pada pukul 11.30 WIB)

Pada program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo, koordinasi dan komunikasi telah terjalin baik antar setiap agen pelaksana pada setiap programnya. Dibuktikan dengan setiap agen pelaksana sudah memahami betul standar, tujuan serta sasaran baik dari Gerakan Bela-Beli Kulon Progo sendiri maupun dari program-programnya. Hal ini

menyebabkan berjalan baiknya implementasi dari program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo.

> "Kemarin ada misskomunikasi itu kita dengan ToMiRa, jadi ada pegawai yang keluar dan ada yang masuk baru tapi kita belum dikasih tau sama pihak Alfamartnya jadi kita susah juga mengaturnya. Memang sistem manajemen pengelolaannya 50:50 tetapi seharusnya kita diberitahu juga" (Wawancara dengan Bp. Johan, selaku penanggung jawab ToMiRa di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sumber Rejeki. Pada hari Kamis, 29 Maret 2018 pukul 13.30 WIB)

Berjalannya komunikasi yang baik kepada seluruh elemen masyarakat menyebabkan seluruh masyarakat Kulon Progo mengetahui dengan baik, standar, makna, sasaran dan tujuan dari Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Akan tetapi terdapat beberapa misskomunikasi yang terjadi pada beberapa program seperti pada pengelolaan rekruitmen pegawai ToMiRa. Hal ini terjadi karena masih kurangnya koordinasi antara Alfamart terhadap Koperasi terkait pengelolaan manajemen sumberdaya manusia.

Apabila disatukan secara keseluruhan Pemerintah Daerah berhasil melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga seluruh elemen masyarakat dapat memahami makna dan tujuan dari Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Kedepannya diharapkan seluruh pelaksana program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi. Apabila yang telah berjalan dengan baik menjadi semakin baik dan yang koordinasi dan komunikasi masih kurang diperbaiki sehingga tercipta keselarasan yang baik demi kelancaran implementasi program itu sendiri.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo mengingat kebijakan ini ditujukan kepada publik. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif pada suatu daerah pelaksanaan program dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja pelaksanaan program.

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial pada saat pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo adalah tingginya pasrtisipasi masyarakat untuk ikut serta memajukan Kulon Progo melalui Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, tingginya antusias masyarakat ini disebabkan masyarakat telah merasa program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

> "Kita tahu maksud dan tujuan dari Bela-Beli Kulon Progo ini dan kita sangat menerima dengan baik karena sangat membantu bagi kita. Maka dari itu kita juga membantu Pemerintah dalam pelaksanaan ini. Saya apresiasi apalagi untuk pengembangan masyarakat" (Wawancara dengan Bp. Margiono dari GAPOKTAN Panca Manunggal, selaku Koordinator GAPOKTAN Beras PNS. Hari Senin, 02 April 2018 pada pukul 11.30 WIB)

Adanya transfer ilmu yang selaras antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat telah membuktikan banyak peningkatan positif terhadap program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Keselarasan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terhadap kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini dikarenakan masyarakat sadar akan makna dan tujuan dari Gerakan Bela-Beli Kulon Progo itu sendiri. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dibuktikan dengan meningkatnya tenaga kerja dan pengetahuan dari masyarakat yang sebelumnya merupakan pengangguran.

> "Hubungannya dengan kondisi sosial itu kita telah mempekerjakan 10 warga lokal untuk bekerja di Pabrik. Pekerjaan tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka" (Wawancara dengan Bapak Meirianto, selaku penanggung jawab Air-Ku di PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 pukul 9.30)

> "Program ToMiRa ini saya rasa sudah membantu pelaku produk lokal UMKM Kulon Progo untuk meningkatkan produksi mereka jadi mereka akan mempekerjakan warga sekitar buat produksi mereka"(Wawancara dengan Bp. Johan, selaku penanggung jawab ToMiRa di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Sumber Rejeki. Pada hari Kamis, 29 Maret 2018 pukul 13.30 WIB)

Hal tersebut berdasarkan pada Pabrik Air-Ku yang telah mempekerjakan 10 orang warga lokal. Pengusaha Batik Gebleg Renteng yang telah menyerap pekerja dari

daerah sekitar pengusaha, serta penjualan produk lokal UMKM Kulon Progo di ToMiRa yang secara langsung telah membantu memberdayakan pelaku-pelaku UMKM di Kulon Progo.

> "Sejak adanya Batik Gebleg Renteng ini jadi pengrajin batik Kulon Progo ini semakin dikenal masyarakat luar daerah dan selalu ada peningkatan pendapatan kita itu setiap tahu." (Wawancara dengan Ibu Sugirin, Sembung Batik. Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 pada pukul 11.00 WIB)

> "RASDA sama Beras PNS sangat menyejahterakan petani. Petani merasakan kepedulian nyata dari pemerintah. Adanya program ini jadi ada konsumsi berkelanjutan sehingga petani tidak khawatir erhadap penghasilan mereka, karena sudah pasti" (Wawancara dengan Bp. Margiono dari GAPOKTAN Panca Manunggal, selaku Koordinator GAPOKTAN Beras PNS. Hari Senin, 02 April 2018 pada pukul 11.30 WIB)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dibuktikan dengan meningkatnya kesejahteraan pengrajin Batik di Kulon Progo dalam hal perindustrian dan perdagangan dimana secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan para pengrajin Batik. Selain itu, pada program RASDA dan Beras PNS ini telah meningkatkan kesejahteraan petani dengan adanya konsumsi berkelanjutan melalui RASDA dan Beras PNS yang memberdayakan petani-petani Kulon Progo. Pada program ToMiRa telah meningkatkan kesejahteraan Koperasi di

Kulon Progo serta telah meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Kulon Progo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara keseluruhan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini dianggap berhasil membantu pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Hal ini juga membuktikan bahwa adanya opini publik yang bagus terhadap Gerakan Bela-Beli Kulon Progo. Dengan kata lain program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini telah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Kulon Progo melalui pemberdayaan dan kesejahteraan.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kondisi ekonomi yang terjadi pada masyarakat dan Pemerintahan. Salah satu tujuan dari adanya Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yaitu menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo. Program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang ditargetkan tidak menggunakan APBD ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan upaya dalam program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo sudah membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan tetapi masih adanya kenaikan-penurunan angka kemiskinan Kulon Progo. Pada tahun 2015 angka kemiskinan Kulon Progo adalah 21,40%. [48] Prosentase tersebut menunjukan adanya peningkatan angka kemiskinan dibandingkan dengan prosentase angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 yaitu 20,64%.

Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo menurut hasil penelitian yang penulis lakukan Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo terjadi peningkatan pada tahun 2015 – 2016. Hal ini membuktikan bahwa program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo telah berhasil dalam mewujudkan salah satu tujuannya, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Berikut data kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2017 :

[48] https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/28/persentase-penduduk-miskin-persen-.html diakses pada 06 April 2018 15.20 WIB (Persentase Penduduk Miskin, 2017)

Tabel 14. Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo Tahun 2015 – 2017

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	Rp 155.969.689.703,30	Rp 170.822.326.558,34
2016	Rp 220.379.806.602,35	Rp 180.273.363.594,69
2017/ September 2017	Rp 1.101.454.432.300,00	Rp 836.586.130.189,38

Sumber : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 – 2017

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadinya peningakatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2015 – 2017. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 pada tabel diatas adalah realisasi per September 2017, dikarenakan untuk data per Desember 2017 belum dipublikasi oleh Pemerintah. Meskipun target anggaran perencanaan masih terjadi peningkatan dan penurunan tetapi dalam hal tujuan dari Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini sudah tercapai dan selalu ada peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kulon Progo ini telah membuktikan bahwa meskipun dalam pelaksanaan tidak banyak dibantu dengan APBD Kulon Progo akan tetapi tetap dapat meningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kulon Progo. Hal tersebut membuktikan bahwa sudah berjalan sesuai tujuan

c. Kondisi Politik

Kondisi politik dalam pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo adalah sebagaimana Pemerintah Daerah, elit-elit politik atau kelompok kepentingan memberikan kontribusi terhadap implementasi program-program. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo selalu mendukung dan beberapa ikut bekontribusi langsung dalam pelaksanaan. Kontribusi yang dilakukan Pemerintah ini disadari oleh masyarakat sehingga secara tidak langsung masyarakat menjadi termotivasi untuk terus berkontribusi dalam pelaksanaan program-program.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, tidak ditemukan kendala dalam faktor kondisi politik. Kondisi politik di Kabupaten Kulon Progo terbilang masih kondusif. Pada awal mula deklarasi Gerakan Bela-Beli Kulon Progo tahun 2013 sampai saat ini Bupati Kulon Progo masih sama yaitu, Bp. Hasto Wardoyo. Bp. Hasto Wardoyo yang merupakan inisiator dari Gerakan Bela-Beli Kulon Progo sampai saat ini masih menjabat sebagai Bupati. Oleh karena itu program-program Gerakan Bela-

Beli Kulon Progo ini menjadi fokus utama dari Pemerintah Daerah Kulon Porogo sampai saat ini.

6. Disposisi Pelaksana/Implementor

Pada faktor disposisi implementor terdapat tiga bagian didalamnya, yaitu, respon implementor terhadap kebijakan, kondisi implementor terhadap kebijakan, serta intensitas disposisi implementor.

a. Respon Implementor terhadap Kebijakan

Karakteristik agen pelaksana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mencakup norma-norma, struktur birokrasi, serta pola-pola hubungan yang terjadi di birokrasi. Hal tersebut akan mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan. Pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini pelaksanaannya melibatkan beberapa agen pelaksana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo serta beberapa kelompok masyarakat yang terlibat pada setiap program. Agen pelaksana yang terlibat telah disebutkan oleh penulis dalam faktor sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan ini.

Dinas Perdagangan Kulon Progo merupakan instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Batik Gebleg Renteng. Petugas pelaksananya adalah Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Bidang Perindustrian membawahi 18 pengrajin batik Kulon Progo yang tergabung dalam asosiasi batik Kulon Progo. Program yang dilaksanakan Bidang Perindustrian adalah penumbuhan dan pengembangan usaha industri berbasis sandang, kulit, dan kerajinan.

> "Tugas pokok fungsi kita itu menumbuhkan, mengembangkan dan pendampingan dan monitoring kepada pelaku-pelaku industri. Tetapi memang pendampingan kita setelah tahun 2014 belum ada lagi" (Wawancara dengan Bp. Totok Sundoro, ST. Selaku KaSie Ekspor Impor Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 pada pukul 10.00 WIB

Dalam pelaksanaan program tersebut Bidang Perindustrian memiliki tugas dan fungsi untuk monitoring dan pendampingan pengrajin batik. Dalam pelaksanaannya menurut wawancara dari narasumber menyampaikan bahwa kurangnya pendampingan dari Pemerintah akan tetapi selalu terjadi peningkatan produksi dan pemasarannya setiap tahun. Hal tersebut terbukti dengan data yang berada pada Dinas Perdagangan terkait peningkatan realisasi Batik Gebleg Renteng hanya sampai tahun 2014. Hal tersebut

membuktikan belum adanya pencatatan dan monitoring kembali yang dilakukan Pemerintah.

Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Tanaman dan Pangan merupakan instansi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program RASDA dan Beras PNS. Petugas pelaksananya adalah GAPOKTAN Kulon Progo dan bekerjasama dengan Bulog DIY untuk pendistribusian program RASDA. Dalam pelaksanaan program RASDA dan Beras PNS ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa mewujudkan keterjangkauan pangan salah satunya dengan melaksanakan kebijakan di bantuan pangan. Tugas pokok dari Dinas Pertanian dan Pangan adalah melaksanakan sosialisasi, monitoring serta pendampingan kepada GAPOKTAN selaku pelaksana.

Skema Kerja Rasda

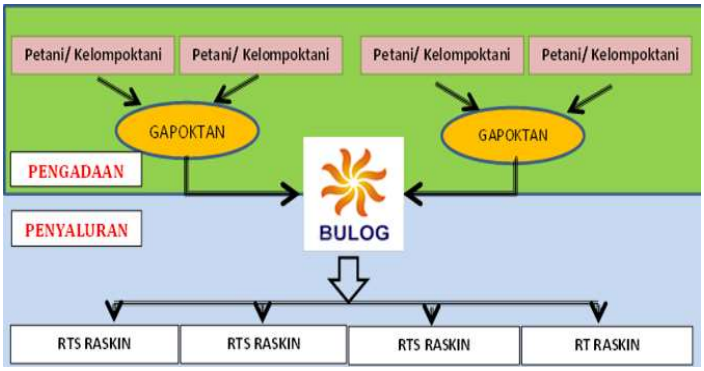

Sumber : Data Dokumen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan pada skema kerja Beras Daerah diatas GAPOKTAN menyalurkan hasil panen yang sudah berupa beras kepada Bulog. Bulog menyalurkan kepada RTS RASKIN di Kulon Progo. GAPOKTAN melaporkan beras hasil panen yang disetorkan kepada Bulog setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Pertanian dan Perdagangan. Dalam pelaksanaannya ketiga implementor ini sudah melaksanakan sesuai dengan urutan skema diatas dan berjalan dengan lancar. Para implementor telah melaksankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga terjadi keselarasan antar para implementor Beras Daerah ini.

Jaringan Antar Stakeholder Beras PNS

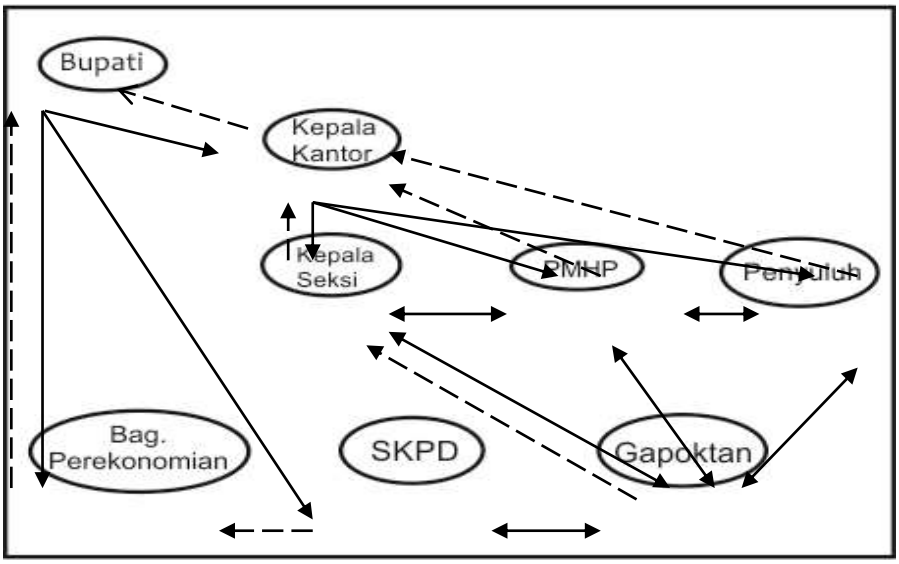

Komando **Laporan** **Koordinasi**

Sumber : Tim Pemantau dan Pengawas Beras PNS

Berdasarkan pada bagan skema stakeholder Beras PNS diatas yaitu Bupati memberikan komando terhadap Kepala Kantor Dinas Pertanian dan Pangan dalam pelaksanaan program Beras PNS. Komando juga diberikan kepada SKPD Kabupaten Kulon Progo untuk pembelian Beras PNS yaitu beras "SEHAT" asli Kulon Progo. Kemudian Bupati memberikan komando kepada Bag. Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai Tim Pemantau Beras Daerah dan Beras PNS. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan memberikan komando untuk pelaksanaan Beras PNS kepada Kepala Seksi, PMHP, dan Penyuluh. Kemudian Kepala Seksi, PMHP, Penyuluh dan GAPOKTAN saling berkoordinasi untuk pelaksanaan Beras PNS.

GAPOKTAN berkoordinasi langsung dengan SKPD untuk pembelian Beras PNS. GAPOKTAN melaporkan hasil pembelian kepada Kepala Seksi Tanaman dan Pangan. Kemudian SKPD memberikan laporan hasil pembelian Beras PNS setiap SKPD tersebut kepada Bag. Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo dan Tim Pemantau dan Pengawas Beras PNS melaporkan hasil pembelian kepada Bupati. Sedangkan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

Menurut hasil wawancara dari Bp. Margiono selaku koordinator GAPOKTAN Beras PNS, narasumber menyampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik sehingga tercipta keselarasan dalam pelaksanaan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan produksi dan pemasaran beras asli Kulon Progo setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa karakteristik kedua agen pelaksana dalam program ini paham dengan baik akan tugas dan fungsinya.

PDAM Tirta Binangun Kulon Progo merupakan instansi yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap program Air-Ku. PDAM tirta Binangun merupakan pelaksana program Air-Ku bersama dengan 10 pekerja di pabrik, serta agen-agen Air-Ku di Kulon Progo. Dalam pelaksanaannya PDAM Tirta Binangun memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu, bertugas untuk emnghimpun dana guna pengembangan dan menjaga kelangsungan hidup PDAM serta mempunyai fungsi untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya PDAM Tirta Binangun sudah melaksanakan

tugas dan fungsinya secara baik. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan dan kemajuan dalam program Air-Ku.

Alur Kerjasama ToMiRa dengan Alfamart

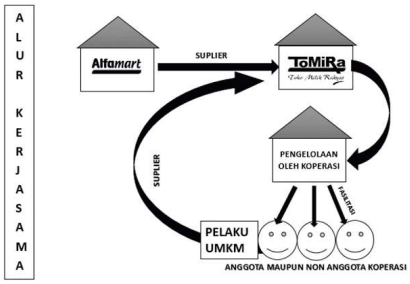

Sumber: Dokumen Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo

Dalam hal pelaksanaan ToMiRa ini Dinas Koperasi UMKM Kulon Progo merupakan penghubung antara Alfamart/Indomart dengan Koperasi di Kulon Progo. Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kulon Progo merupakan instansi yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap program ToMiRa. Pelaksana dari program ini adalah 16 Koperasi yang terdaftar sebagai pengambil alih Alfamart/Indomart. Tugas dan fungsi Dinas Koperasi ini adalah monitoring, memfasilitasi, dan pendampingan pelaksanaan pengambil alihan ToMiRa oleh Koperasi Kulon Progo.

Dalam pengelolaannya Koperasi bekerjasama dengan Alfamart/Indomart. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan peneliti membuktikan bahwa seluruh agen pelaksana dalam pelaksanaan program ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Dinas Koperasi UMKM memfasilitasi awal mula kerja sama antara Alfamart/Indomart dengan pihak Koperasi. Terbukti dengan adanya peningkatan pendirian ToMiRa setiap tahunnya yang menandakan bahwa adanya konsistensi dari para agen pelaksana sehingga membuat Koperasi yang lain ikut bergabung dalam program ini.

Berdasarkan penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo seluruh implementor sudah memahami tugas dan fungsinya masih masing sehingga dalam pelaksanaannya terjadi keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan program-program tersebut.

b. Kondisi

Kondisi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kondisi pemahaman implementor terhadap kebijakan. Pada pelaksanaan program-program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo ini seluruh aktor terkait pelaksanaan sudah mengetahui dengan baik standar, tujuan, sasaran dan tujuan landasan hukum yang ada pada setiap program.

Sehingga pada pelaksanaan program-program cenderung berjalan lancar dan terlaksana dengan baik.

c. Intensitas Disposisi Implementor

Sejauh ini setiap implementor dari setiap program sudah memahami betul tugas dan fungsi pada setiap implementor. Dalam pelaksanaannya para implementor sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya serta telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, meskipun masih ada sedikit kendala.